

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN SISTEM AKUNTANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I Akuntansi Syariah



Oleh:

Rizka Azkia Asnawi

1705046001

**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601291, Semarang Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti serta mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah saudara:

Nama : Rizka Azkia Asnawi

NIM : 17050460001

Judul : **Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

Demikian ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., S.E., M. Si.

NIP. 19790512 200501 2 004

Semarang, 14 November 2022

Pembimbing II

Singgih Muheramtoadi, S.Sos.I, M.E.I

NIP. 19821031 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601291, Semarang Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

Skripsi Saudari : Rizka Azkia Asnawi

NIM : 1705046001

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Akuntansi Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal:

16 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 16 Desember 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Irma Istiariani, SE., M. Sc.
NIP. 198800708 201903 2 013

Singgih Muheramtoadi, S.Sos.I, M.E.I
NIP. 19821031 201503 1 003

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Mashilal, SEI, M. Si
NIP. 19840516 201903 1 005



Drs. H. Wahab, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ari Kristin P., S.E., M. Si.
NIP. 19790512 200501 2 004

Singgih Muheramtoadi, S.Sos.I, M.E.I
NIP. 19821031 201503 1 003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ ﴿٨﴾

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu apabila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, Berharaplah.

(QS. Al-Insyirah:6-8)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, segala rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan Salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam dan Ilmu

Pengetahuan

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya dapat mempersembahkan karya ini, yang jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan. Kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.

Yang pertama saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya dan adik-adik saya, Ayahanda Asnawi M Amin dan Ibunda Muthmainnah serta Muhammad Syafiq Asnawi dan Suhaila Asnawi yang telah memberikan saya dukungan dan semangat, serta doa yang tak pernah putus setiap harinya;

Selanjutnya terima kasih kepada teman-teman yang membantu dan sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir Early Maya Ramadhanty, Vevi Ariyanti Lubis dan Aulia Shobibatur Rahmah;

Yang terakhir karya ini saya persembahkan kepada sahabat dan teman-teman tersayang Lala Afiatul Latifah, Nurul Dania Rahma, Hafiza Rahmayani, Vieka Adyva, Ermita Fatimah Hasibuan, Yulia Afnidar dan Raisa Zuhra Salsabila, Resty Irawan serta keluarga, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan support dan semangat selama menyelesaikan tugas akhir;

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, memberi semangat dan doa.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;

Terima kasih juga kepada pihak yang telah bertanya “sudah sampai BAB berapa?”, “kapan nyusul?”, “kapan sidang?”, “kapan wisuda?” Karena dengan pertanyaan seperti itu sangat memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Terima kasih kepada UIN Walisongo yang telah menjadi tempat untuk saya menimba ilmu, karya ini saya persembahkan untuk almamater tercinta.

Terima Kasih

DEKLARASI

Dengan bermohon kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq kepada penulis, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Azkia Asnawi

Nim : 1705046001

Prodi : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

Penulis menyatakan bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dibuat dengan segala kejujuran dan tanggung jawab. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah atau telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Informasi dan hasil skripsi merupakan hasil renungan penulis, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi digunakan sebagai bahan rujukan.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 November 2022
Deklarator,



Rizka Azkia Asnawi
1705046001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Berikut ini adalah pedoman transliterasi:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain’	...‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal dan rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ِ...و	Kasrah dan wau	Au	a dan i I

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ا...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah *t*.

Contoh: الرَّوْضَةُ الْأَطْفَالُ dibaca raudatul atfāl.

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: الرَّوْضَةُ الْأَطْفَالُ dibaca arraudhah.

3. Ta Marbutah yang diikuti kata sandang *al*.

Contoh: الْمَدِينَةُ الْمُتَوَّرَةُ dibaca al-Madīnah al-Munawwarah/alMadīnatul

Munawwarah.

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama atau huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: نَزَّلَ dibaca nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasinya ini kata sandang dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الشِّفَاءُ dibaca asy-syifā

2. Kata sandang diikuti huruf qamariah, yaitu kata sandang yang di transliterasikan di depan dan sesuai pula bunyinya.

Contoh: الْقَلَمُ dibaca al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُونَ dibaca ta' khuzūna.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya penulisan kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya di rangkakan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkakan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh: إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ dibaca innallāha lahuwa khairurrāziqīn

ABSTRAK

Pengetahuan keuangan atau literasi keuangan merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam membuat keputusan yang bijaksana secara efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki. Sistem akuntansi yang relevan dan transparan akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kota Banda Aceh merupakan daerah istimewa yang menerima pemberlakuan otonomi khusus dari pemerintahan. Terdiri dari 9 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 265.111 jiwa. Pada tahun 2021 Kota Banda Aceh menerima alokasi dana sebesar 823 milyar rupiah untuk pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari kuesioner yang diolah menggunakan *IBM Statistics SPSS Versi 22*. Populasi pada penelitian ini adalah desa-desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sampel penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bagian keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan indikator penelitian bahwa variabel tingkat pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, variabel sistem akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta variabel tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi secara bersamaan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: *Tingkat pengetahuan; Sistem Akuntansi; Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.*

ABSTRACT

Financial knowledge or financial literacy is a set of people's knowledge and skills in making wise decisions effectively by utilizing all the financial resources they have. A relevant and transparent accounting system will affect the accountability of village financial management. The city of Banda Aceh is a special area that has received special autonomy from the government. It consists of 9 districts with a population of 265,111 people. In 2021 the City of Banda Aceh receives an allocation of funds of 823 billion rupiah for village development. This study aims to determine the effect of the level of knowledge and the accounting system on the accountability of village financial management in Kuta Alam District, Banda Aceh City. In this research, the technique used is quantitative method with descriptive statistical analysis. The data used came from a questionnaire that was processed using IBM Statistics SPSS Version 22. The population in this study were villages in Kuta Alam District, Banda Aceh City. The sample for this study used a non-probability sampling technique, namely the village head, village secretary and village finance department. Based on the results of research conducted by researchers according to research indicators that the variable level of knowledge has a significant effect on the accountability of village financial management, the accounting system variable has a significant effect on the accountability of village financial management, and the variable level of knowledge and accounting system simultaneously has an effect on financial management accountability village.

Keywords: *Knowledge level; Accounting System; Village Financial Management Accountability.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh”**

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh Iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil kerja keras, namun juga tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor 1, Bapak Prof. Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag selaku Wakil Rektor 1, dan Bapak Dr. Abdul Kholiq, M.Ag selaku Wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Saifullah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III dan para dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.E, M.Si, CA. CPAI, selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, S.E, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. Dede Rodin, M.Ag selaku dosen wali yang telah mendukung proses studi khususnya dalam memberikan bimbingan perencanaan studi setiap semesternya dan mendukung moral dalam proses menempuh studi.
5. Ibu Dr. Ari Kristin P., S.E, M,Si selaku Pembimbing 1 dan Bapak Singgih Muheramtoadi, S.Sos.I, M.E.I selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
7. Segenap staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Kepala Desa dan aparatur desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang telah meluangkan waktu dan bersedia membantu penelitian penulis. Semoga kita semua sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusannya.
9. Kepada Keluarga Besar penulis. Terutama ayahanda dan ibunda tercinta Bapak Asnawi M Amin dan Ibu Muthmainnah yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukung ananda sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada adik-adik tersayang, Muhammad Syafiq Asnawi dan Suhaila Asnawi yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Semoga kalian sukses dalam meraih cita-cita.
11. Kepada keluarga besar M Amin Hasan dan Muhammad Yacob yang telah memberikan support kepada penulis. Semoga panjang umur dan sehat selalu.

12. Kepada segenap keluarga besar AKS-A 2017 yang telah memberikan kenangan semasa perkuliahan berlangsung. Semoga kita semua sukses dalam mencapai cita-cita.
13. Kepada IKRH Semarang, IKRH 26 Banda Aceh, KMA UIN Walisongo, Tax Center UIN Walisongo Semarang periode 2019-2020.
14. Kepada keluarga besar Universitas Islam Negeri Walisongo, terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih semoga kebaikan kalian semua dapat di balas oleh Allah SWT. Dan di akhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis yang telah berjuang menyelesaikan penulisan ini serta masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis memohon adanya kritik dan saran yang dapat membangun sehingga penulis dapat memperbaiki karya-karya tulis selanjutnya.

Semarang, 14 November 2022

Rizka Azkia Asnawi

1705046001

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	10
2.1.2. Tingkat Pengetahuan	10
2.1.3. Sistem Akuntansi.....	16
2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.1.5. Implementasi Ayat Terkait Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	28
2.2. Penelitian Terdahulu.....	31
2.3. Kerangka Berpikir dan Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data	36
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	36

3.3. Populasi dan Sampel	37
3.4. Metode Pengumpulan Data	38
3.5. Variabel dan Definisi Operasional Data.....	39
3.6. Teknik Analisis Data.....	41
3.6.1. Uji Validitas	41
3.6.2. Uji Reliabilitas.....	41
3.6.3. Analisis Deskriptif.....	42
3.6.4. Uji Asumsi Klasik	42
3.6.5. Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Penyajian Data Penelitian.....	46
4.1.1. Gambaran Objek Penelitian	46
4.1.2. Deskripsi Responden	47
4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian.....	50
4.2. Analisis dan Interpretasi Data	53
4.2.1. Uji Validitas	53
4.2.2. Uji Reliabilitas.....	54
4.2.3. Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.3. Uji Asumsi Klasik	55
4.3.1. Uji Normalitas	55
4.3.2. Uji Multikolinearitas.....	57
4.3.3. Uji Heterokedastisitas.....	58
4.4. Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
4.4.1. Uji Hipotesis.....	61
4.5. Pembahasan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	69
5.3. Keterbatasan Penelitian	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	74
RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Anggaran Realisasi Dana Desa di Kecamatan Kuta Alam.....	6
Tabel 2. 1 Berbagai Literatur Penelitian	31
Tabel 3. 1 Daftar Desa di Kecamatan Kuta Alam.....	37
Tabel 3. 2 Alternatif Jawaban	39
Tabel 3. 3 Operasional Variabel.....	40
Tabel 4. 1 Desa-Desa di Kecamatan Kuta Alam.....	47
Tabel 4. 2 Visi dan Misi Kecamatan Kuta Alam	47
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	49
Tabel 4. 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	50
Tabel 4. 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Variabel X1	51
Tabel 4. 9 Karakteristik Responden Berdasarkan Variabel X2	51
Tabel 4. 10 Karakteristik Responden Berdasarkan Variabel Y	52
Tabel 4. 11 Uji Validitas	53
Tabel 4. 12 Uji Reliabilitas	54
Tabel 4. 13 Analisis Deskriptif	55
Tabel 4. 14 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov	56
Tabel 4. 15 Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4. 16 Uji Heterokedastisitas Metode Glejser	58
Tabel 4. 17 Analisis Regresi Linear Berganda	60
Tabel 4. 18 Uji t	61
Tabel 4. 19 Uji F	62
Tabel 4. 20 Uji Koefisien Determinan (R^2)	63
Tabel 4. 21 Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan	23
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir.....	33
Gambar 4. 1 Uji Normalitas P-P Plot.....	57
Gambar 4. 2 Uji Heterokedastisitas Scatterplot	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	74
Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden.....	78
Lampiran 3 Deskripsi Responden.....	81
Lampiran 4 Deskripsi Variabel.....	82
Lampiran 5 Uji Validitas.....	84
Lampiran 6 Uji Reliabilitas.....	87
Lampiran 7 Analisis Deskriptif.....	87
Lampiran 8 Uji Normalitas.....	87
Lampiran 9 Uji Multikolinearitas.....	88
Lampiran 10 Uji Heterokedastisitas.....	88
Lampiran 11 Uji t.....	89
Lampiran 12 Uji F.....	89
Lampiran 13 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	90
Lampiran 14 Surat Penelitian Kecamatan.....	91
Lampiran 15 Surat Penelitian Desa.....	93
Lampiran 16 Surat Persetujuan Penelitian Kecamatan.....	95
Lampiran 17 Surat Persetujuan Penelitian Desa.....	97

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu basis atau sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan pemerintah desa sejak tahun 1979 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa adalah salah satu unit pemerintahan terkecil yang sudah saatnya mengambil peran dalam pembangunan. Jika pembangunan dimulai dari desa, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud. Tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, namun juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik dan dapat mengelola keuangan desa dengan baik.¹ Maka dari itu dalam membangun dan mengelola sebuah desa agar mencapai kesejahteraan desa dibutuhkan kepala desa dan aparat desa yang mampu meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menjalankan misi tersebut maka kepala desa dan aparatnya harus memiliki pengetahuan terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Menurut Munifaah Anaan (2020) pemahaman akuntansi seseorang dapat dinilai dari tingkatan pengetahuan seseorang dalam memahami siklus akuntansi.² Pengetahuan merupakan informasi, dan keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan, baik secara teori maupun pemahaman praktis. Kompetensi dalam aspek pengetahuan merupakan pengetahuan dalam bidang sistem akuntansi yang harus dimiliki oleh seluruh aparat desa di semua jenjang tingkat jabatan.

¹ Alfian Marlesta, Linda Marlinda, and Sigit Herprabowo, "Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri," *Sniptek 2016* (2016): 324–332.

² Muniifah Anaan, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus Covid-19 Di Kompas.Com* (Universitas Pancasakti Tegal, 2020), <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>.

Perolehan pengetahuan melibatkan proses kognitif yang kompleks meliputi persepsi, pembelajaran, komunikasi, asosiasi, dan argumentasi.³

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu, keuangan desa juga harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang kebijakan tata kelola desa juga dianggap sebagai kebijakan yang dapat membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan diantaranya adalah mengelola anggaran kepala desa. dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. kemudian adanya pemberian hasil tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkatnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Penerbitan UU tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelola keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah desa maka aparatur desa harus memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan kewajiban kepala desa dan aparatnya dalam memberikan pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan, pelaporan, dan pengungkapan aktivitas untuk meminta pertanggungjawaban. Singkatnya, kepala desa dan aparatnya harus mengelola sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Dengan transparansi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

³ Rusdi Abdulkarim, "Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango)," *AkMen JURNAL ILMIAH* 16, no. 4 (2019): 580–593.

mengelola keuangan yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan undang-undang.

Menurut Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliana (2017), akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah kepala desa dan aparatnya dalam memberikann pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak yang memberikan amanah dan kewenangan. Kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi memberikan informasi keuangan kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.⁴

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Daerah ini mendapat julukan sebagai “Serambi Mekkah” dikarenakan Aceh merupakan provinsi yang memiliki pengaruh peradaban baik dari keilmuan, pemerintahan, politik, sistem ekonomi, dan lain-lain. Salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh yang merupakan pusat dari Provinsi Aceh. Saat ini Kota Banda Aceh tercatat memiliki penduduk sebanyak 265.111 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 desa.⁵

Adapun keistimewaan lainnya yang ada di Kota Banda Aceh adalah pemberlakuan otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Pemberian otonomi khusus ini bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh untuk tetap berada dalam persatuan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat aceh. Hal ini diberlakukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang berisikan tentang norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional

⁴ L. N. Setiana, D. N., & Yuliani, “Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *University Reseach Colloquim* 5 (2017): 205–210.

⁵Pemerintah Kota Banda Aceh, “Kecamatan & Gampong,” <https://Bandaacehkota.Go.Id/>, accessed August 5, 2022, https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan_gampong.html.

menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh, melainkan pembinaan, fasilitas, penetapan, dan pelaksanaan, urusan pemerintah yang dilakukan oleh pusat karena bersifat nasional. Dalam peraturan ini perimbangan Provinsi Aceh tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Kerjasama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Aceh diikuti dengan pengelolaan sumber keuangan secara transparan dan akuntabel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.⁶ Pada penelitian ini salah satu kecamatan yang akan diteliti adalah Kecamatan Kuta Alam. Dalam Kecamatan Kuta Alam terdapat 11 desa yaitu Desa Peunanyong, Desa Mulia, Desa Laksana, Desa Keuramat, Desa Kuta Alam, Desa Beurawe, Desa Kota Baru, Desa Bandar Baru, Desa Lampulo, Desa Lamdingin, dan Desa Lambaro Skep. Dari 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam merupakan daerah yang memiliki prestasi yang baik di beberapa desanya, hal ini dilihat dari kemajuan desa dalam mengelola desa dengan baik. Pada tahun 2020 sebanyak 7 desa di Kecamatan Kuta Alam ditetapkan sebagai desa mandiri, diantaranya Desa Peunayong, Desa Mulia, Desa Laksana, Desa Kuta Alam, Desa Kota Baru, Desa Bandar Baru, dan Desa Lampulo. Penetapan desa mandiri dikarenakan desa-desa tersebut dianggap sebagai desa ideal yang mampu menjalankan indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan baik.

Saat ini kondisi pemerintahan daerah dan aparatur daerah yang masih rendah perlu diperhatikan terutama dalam hal pengelolaan keuangan, agar tidak terjadi kesalahan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Maka dari itu diperlukan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat disusun dengan baik dan tertib sebagaimana diamanatkan dalam UU desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara profesional untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat desa.⁷ salah

⁶ Debora Sanur, "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 65–83.

⁷ Abdulkarim, "Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango)."

satu penyebab rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia mengenai keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan pengetahuan dan kemampuan yang cukup agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan optimal. Saat ini, keakuratan dalam sistem akuntansi desa masih dipertanyakan masyarakat, hal ini dikarenakan fasilitas dan juga perangkat desa yang masih kurang diperhatikan dan disaring oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengaruh yang dimiliki oleh aparat desa terutama kepala desa dan bagian keuangan desa sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAP).

Pada tahun 2022 Kota Banda Aceh merupakan daerah yang tercatat sebagai kota yang memiliki presentase pencapaian kinerja pencegahan korupsi tertinggi di Provinsi Aceh. Dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota lainnya Kota Banda Aceh adalah kota yang dinilai berhasil mencegah adanya tindakan korupsi di peringkat pertama. Hal ini dapat dilihat dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK yang memberikan nilai 87,14% kepada Pemerintah Kota Banda Aceh terkait kinerja pencegahan korupsi.⁸ Adapun data dana realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa pada tahun 2021 di Kecamatan Kuta Alam adalah sebagai berikut:

⁸ Muhammad Yoga Prastyo, "KPK RI Berikan Nilai MCP Banda Aceh 87,14%, Tertinggi Di Aceh," *News.Detik.Com*, last modified 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5908034/kpk-ri-berikan-nilai-mcp-banda-aceh-8714-tertinggi-di-aceh>.

Tabel 1. 1 Data Anggaran Realisasi Dana Desa di Kecamatan Kuta Alam

Nama Desa	Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi
Desa Peunayong	Rp. 781.502.000,00	Rp. 728.503.160,00
Desa Mulia	Rp. 834.591.000,00	Rp. 830.834.100,00
Desa Laksana	Rp. 785.086.000,00	Rp. 783.075.510,00
Desa Keuramat	Rp. 1.281.844.759,00	Rp. 1.339.537.407,00
Desa Kuta Alam	Rp. 727.148.000,00	Rp. 719.403.588,00
Desa Beurawe	Rp. 955.955.000,00	Rp. 874.595.150,00
Desa Kota Baru	Rp. 836.252.000,00	Rp. 820.748.034,00
Desa Bandar Baru	Rp. 1.588.794.131,00	Rp. 1.461.502.000,00
Desa Lampulo	Rp. 1.925.169.637,00	Rp. 1.739.072.164,00
Desa Lamdingin	Rp. 1.532.380.236,00	Rp. 1.390.423.878,00
Desa Lambaro Skep	Rp. 1.036.838.000,00	Rp. 627.286.996,00

Seperti yang diketahui, masih terdapat beberapa pemberitaan yang membahas adanya kasus tindakan korupsi yang menjerat kepala desa, tentunya perlu disiapkan mekanisme dan peraturan yang menjelaskan pencegahan tindakan tersebut terjadi. Pada tahun 2021 Kota Banda Aceh menerima alokasi dana desa kurang lebih mencapai 823 miliar rupiah yang diberikan pemerintah pusat sebagai implikasi pembangunan desa. hal tersebut dapat memicu adanya tindakan korupsi yang dapat menyeret kepala desa ke penjara. Dengan perbedaan karakteristik desa, kompetensi aparat desa dan regulasi yang relatif baru diduga dapat menyebabkan potensi penyelewengan dalam tahapan pengelolaan dana desa melalui proses perencanaan hingga tahap pelaporan dan evaluasi. Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Jaringan Paralegal Indonesia (JPI). Sebagian kasus korupsi tingkat desa disebabkan bukan karena niat kejahatan kepala desa atau aparat desa, melainkan karena ketidakpahaman aparat desa terutama bagian keuangan desa dalam memanfaatkan anggaran yang diberikan.⁹ Anggaran yang diberikan dinilai cukup besar dan tentunya memerlukan pengelolaan yang baik dan tepat. Oleh karena itu, diperlukan peran perangkat desa terutama bagian keuangan desa yang paham tentang keuangan desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Mengingat bahwa dalam

⁹ Djpb Kemenkeu, "Literasi Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Lentera Pembangunan Desa," accessed October 28, 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3871-literasi-pengelolaan-keuangan-desa-sebagai-lentera-pembangunan-desa.html>.

pengelolaan dana desa tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa beserta aparat desa dalam hal penatausahaan, perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti tentang **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
- 2) Bagaimana pengaruh sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
- 3) Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- 2) Mengetahui bagaimana pengaruh sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- 3) Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi pengembangan dan sumber pemikiran ilmu akademik serta dapat dijadikan referensi dan bukti tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama atau topik yang berkenaan.

b. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Diharapkan pada penelitian ini dapat membantu kepala desa dan aparatnya terutama bagian sekretaris dan keuangan desa dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pengetahuan bagi pembaca mengenai laporan keuangan desa.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi outline sistematis untuk menjelaskan dan menepatkan arah penulisan skripsi atau gambaran umum dari bab ke bab.¹⁰ Penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi kedalam lima bab, dimana setiap bab nya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Berikut penjelasan tentang tujuan dari masing-masing bab.

¹⁰ T Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam," *Buku Pedoman* (2018).

BAB I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab tinjauan pustaka akan diuraikan tentang landasan teori, pengertian mengenai pengetahuan, sistem akuntansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dalil ayat akuntansi terkait dengan pembahasan, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, dan teknik analisis data seperti analisis deskriptif, uji validitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab analisis data dan pembahasan akan diuraikan tentang penyajian data penelitian seperti gambaran objek penelitian, deskripsi responden, deskripsi variabel penelitian, analisis dan interpretasi data mengenai uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda, dan pembahasan penelitian.

BAB V Penutup

Dalam bab penutup akan diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti terkait penelitian kepada kepala desa dan aparatnya serta yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Budi Santoso (2015) menyatakan bahwa agensi merupakan ketertarikan hubungan antara dua pihak dimana salah satunya merupakan agen. Agen adalah pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yang disebut dengan *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta pengawasan tindakan yang dilakukan oleh agen.¹¹

Menurut Abdul Hakim (2017) pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik adalah suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, baik aparat desa maupun pemerintah bertindak sebagai agen yang berkewajiban memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan. Pemerintah yang bertindak sebagai partisipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik secara ekonomi, sosial, dan politik.¹²

2.1.2. Tingkat Pengetahuan

A. Pengertian Tingkat Pengetahuan

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan pekerjaan. Pengetahuan merupakan aset yang dimiliki oleh setiap orang dan dapat diperoleh melalui pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain.

¹¹ Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar Teori, Dan Problematika Hukum Keagenan*, ed. Risman Sikumbang (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).

¹² Abdul Hakim, Kirmizi, and Sem Paulus, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dan Sistem Pengendalian Intrn Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 4, no. 1 (2017): 1756–1770.

Menurut Notoatmojo dalam Tirta Afnis pengetahuan seseorang terhadap suatu objek memiliki intensitas atau tindakan yang berbeda. Secara garis besar tingkat pengetahuan dibagi menjadi 6 tingkat yaitu:

1. Tahu (*Know*), merupakan tingkatan terendah dalam mengamati atau mempelajari sesuatu yang telah di terima. Selain itu, tahu juga merupakan kata kerja yang digunakan untuk mengukur orang dalam mempelajari, menyebut, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan, dan sebagainya.
2. Memahami (*Comprehention*), memahami merupakan suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap objek tersebut, dan juga tidak sekedar menyebutkan, namun juga orang tersebut dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Orang yang telah memahami objek dan materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menarik kesimpulan, dan meramalkan objek yang dipelajari.
3. Aplikasi (*Aplication*), aplikasi merupakan makna apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat mengaplikasikan prinsip yang diketahui yang diketahui tersebut pada situasi dan kondisi yang lain.
4. Analisis (*Analysis*), analisis merupakan kemampuan dalam menjabarkan atau memisahkan, lalu mencari hubungan antara komponen-komponen dalam suatu objek atau masalah yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang telah mencapai tingkatan ini adalah apabila orang tersebut dapat membedakan, nemisahkan, mengelompokkan, dan membuat bagan terhadap pengetahuan objek.
5. Sintesis (*Synthesis*), sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam merangkum suatu hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang sudah dimiliki.
6. Evaluasi (*Evaluation*), evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi penilaian terhadap suatu objek tertentu.

Penilaian ini berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Notoatmojo adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan seseorang kepada perkembangan orang lain menuju impian atau cita-cita tertentu yang dapat menentukan manusia dapat berbuat dan mengisi kehidupan agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan. Pentingnya pendidikan dapat dipengaruhi oleh seseorang terutama dalam perilaku dan pola hidup. Semakin tinggi pendidikan yang diraih maka semakin mudah seseorang dalam menerima informasi.

2. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu keburukan yang harus dilakukan demi menunjang kehidupan dirinya sendiri dan kehidupan keluarganya. Pekerjaan tidak diartikan sebagai sumber kesenangan, namun cara mencari nafkah yang terkadang menimbulkan rasa bosan, berulang, dan memiliki banyak tantangan merupakan kegiatan yang dapat menyita waktu.

3. Usia

Usia merupakan umur individu yang terhitung mulai dari seseorang dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup umur maka semakin matang pula seseorang berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa dapat dipercaya karena pengalaman yang di dapatnya dari pada orang-orang yang belum cukup dewasa.

4. Lingkungan

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu atau kelompok.

5. Sosial Budaya

Sistem sosial budaya pada masyarakat dapat memberikan pengaruh dari sikap dalam menerima informasi.

Pada penelitian ini pembahasan mengenai tingkat pengetahuan yang akan dijelaskan adalah pengetahuan keuangan atau literasi keuangan. Menurut Atikah Triani dan Rahmah literasi keuangan adalah kemampuan dan penguasaan seseorang dalam memahami bagaimana cara mengatur, mengelola, dan merespon risiko dari sumber daya keuangan untuk mencapai keputusan keuangan yang baik.¹³ Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan tidak hanya terbatas pada pemahaman pendapatan dan pengeluaran yang terjadi, melainkan terdapat unsur keuangan lain yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan baik keuangan individu, pemerintah, maupun keuangan lainnya dalam pengelolaan keuangan.

Menurut OJK (Otoritas Jasa keuangan) literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.¹⁴ Dengan kata lain literasi keuangan merupakan rangkaian proses aktivitas dalam meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan masyarakat sehingga mereka dapat mengelola keuangan dengan lebih baik.

Menurut Dwitya Aribawa dalam jurnalnya menyatakan bahwa literasi keuangan berdasarkan sudut pandang pemerintah, adanya literasi keuangan yang baik pada masyarakat maka pemerintah dapat memperoleh pemasukan pajak yang maksimal dan mendapatkan pengembangan

¹³ Atikah Triani and Rahma Wahdiniwaty, "Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Universitas Komputer Indonesia)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–1699.

¹⁴ OJK, "Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /Seojk.07/2017," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–1699.

infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.¹⁵ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal ini merumuskan jika literasi keuangan merupakan faktor fundamental untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Dengan adanya literasi keuangan akan meminimalisir terjadinya keputusan yang salah terhadap isu ekonomi dan keuangan.

Menurut Melisa literasi keuangan adalah rangkaian proses yang dapat meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan masyarakat sehingga mereka dapat mengelola keuangan dengan baik. Dengan itu masyarakat semakin dituntut untuk terbuka akan keuangan yang formal.¹⁶ Pentingnya masyarakat dapat mengelola keuangan terutama dalam pekerjaan dibidang keuangan bertujuan untuk memahami dan memiliki keterampilan dalam mengatur finansial yang tepat, baik secara pendapatan maupun pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan maka semakin baik kesejahteraan dan kemakmuran yang dicapai dalam sebuah usaha ataupun sebuah instansi.

Pendapat Sandra J. Huston dalam jurnalnya menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep dan dimensi literasi keuangan dapat merubah pengetahuan secara tepat kedalam perilaku.¹⁷ Hal ini dapat diartikan sebagai keahlian yang dimiliki oleh setiap orang dengan kemampuan mengelola pendapatan sehingga dapat mencapai peningkatan kesejahteraan finansial. Oleh karena itu pentingnya pengetahuan keuangan menjadi hal dasar bagi setiap orang karena berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan memiliki dampak bagi pengambilan keputusan ekonomi yang baik dan tepat.

¹⁵ Dwitya Aribawa, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan UMKM Di Jawa Tengah," *Siasat Bisnis* 20, no. 1 (2016): 1–13, <https://journal.uii.ac.id/JSB/article/view/4424/3907>.

¹⁶ Melisa, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang," *Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2019.

¹⁷ Sandra J. Huston, "Measuring Financial Literacy," *Journal of Consumer Affairs* 44, no. 2 (2010): 296–316.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan keuangan atau literasi keuangan merupakan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait dengan finansial agar mampu mengelola dan memanfaatkan keuangan secara maksimal yang diharapkan kemampuan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga dapat mengambil sikap dan memilih keputusan keuangan secara bijak.

C. Indikator Tingkat Pengetahuan

Menurut jurnal Sandra J. Huston literasi keuangan adalah kemampuan dalam memahami kondisi keuangan serta konsep dan dimensi literasi keuangan yang dapat mengubah pengetahuan secara tepat kedalam perilaku. Terdapat dua indikator dalam literasi keuangan menurut Sandra J. Huston yaitu:

1. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan sebagai kumpulan pengetahuan keuangan dan implementasinya melalui bentuk keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun lingkup pengetahuan keuangan hanya pada pengetahuan individu mengenai cara penggunaan produk keuangan yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman pribadi.

2. Dimensi Aplikasi

Dimensi aplikasi adalah kemampuan individu yang dilandasi dengan kepercayaan dirinya dalam menggunakan produk keuangan yang baik. Pengetahuan keuangan yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman akan diterapkan dan di kembangkan untuk dijadikan pengalaman baru dan pengetahuan baru.

2.1.3. Sistem Akuntansi

A. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan.¹⁸ Sistem merupakan suatu institusi penting didalam pemerintahan. Dengan adanya sistem akan menjadi penunjang terhadap kinerja perusahaan maupun instansi pemerintah baik pemerintahan kecil maupun besar. Sistem dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama yang baik didalam unsur-unsur sistem tersebut. Dalam hal ini sistem bekerja dalam suatu jaringan dari suatu prosedur yang berhubungan untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran yang dimaksud agar tercapai tujuan sistem itu sendiri.

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.¹⁹ Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan adalah pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan.²⁰

Sedangkan sistem akuntansi menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.²¹

¹⁸ V.Wiratna Sujarweni, *Sistem Akuntansi*, ed. Mona (Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2020).

¹⁹ BPK, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)." (2010), <http://www.dikti.go.id/files/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>.

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan," *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM*, no. September (2009): 1–2.

²¹ *Ibid.*

Menurut V. Wiratna Sujarweni sistem akuntansi adalah kumpulan elemen berupa formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.²² Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah sebuah proses berupa transaksi yang dicatatkan di dalam formulir kemudian di proses dengan penjurnalan, membuat buku besar, buku pembantu, dan hasilnya berupa laporan keuangan yang akan digunakan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Mulyadi sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.²³ Penting bagi pemerintah memiliki sistem akuntansi, bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi namun juga sistem akuntansi dapat mendukung pencapaian organisasi atau instansi dengan menghasilkan laporan keuangan secara akurat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan sistem akuntansi merupakan sebuah metode berupa pencatatan transaksi yang selanjutnya akan dilakukan penjurnalan, pemindahan ke buku besar, dan akhirnya menghasilkan sebuah laporan keuangan untuk dihasilkan kepada pengguna laporan keuangan dengan tujuan dapat mendukung pencapaian sebuah organisasi.

B. Tujuan Sistem Akuntansi

Beberapa tujuan dari sistem akuntansi yaitu:

1. Sebagai penyedia informasi bagi pengelola usaha.
2. Mampu untuk meningkatkan informasi dari sistem sebelumnya baik dalam kualitas penyajian maupun sistem informasinya.
3. Dapat menyesuaikan pengelolaan internal dalam rangka untuk meningkatkan kecakupan informasi akuntansi, dan untuk

²² Sujarweni, *Sistem Akuntansi*.

²³ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, ed. Ema Sri Suharsi, Edisi 4. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016).

menyiapkan pencatatan dan lengkap dalam perlindungan dan pertanggungjawaban kekuasaan instansi.

4. Mampu untuk mengurangi beban pekerja dalam pencatatan akuntansi.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Akuntansi

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja sistem akuntansi yaitu:

1. Keterlibatan Pemakai

Keterlibatan pemakai merupakan keterlibatan dalam proses pengembangan sistem oleh anggota organisasi atau anggota dari kelompok pengguna target. Semakin sering pemakai menggunakan sistem maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penggunaan sistem tersebut.

2. Pelatihan

Pengembangan sistem pada umumnya akan lebih baik jika para anggotanya dilatih sebelumnya. Taraf pelatihan harus disesuaikan dengan pengetahuan setiap anggota. Anggota yang mewakili pemakai, serta para akuntan dan analisis junior, oleh karena itu akan memerlukan pelatihan dasar dibidang analisis dan perancangan. Pelatihan juga berguna untuk memperbaiki komunikasi antar anggota.

3. Dukungan Manajemen Puncak

Manajemen puncak merupakan manajemen tertinggi dari sekelompok kecil eksekutif. Dukungan manajemen puncak meliputi jaminan pendanaan dan menentukan prioritas pengembangan.

4. Kemampuan Pemakai

Kemampuan pemakai sistem akuntansi berarti kapasitas seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan juga merupakan penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.

D. Indikator Sistem Akuntansi

Menurut V.Wiratna Sujarweni sistem akuntansi adalah kumpulan dari elemen berupa formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Beberapa indikator menurut V. Wiratna Sujarweni yaitu:

1. Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat terjadinya transaksi berupa faktur/bon. Formulir dapat ditulis dalam secarik kertas untuk didokumentasikan suatu transaksi ekonomi. Formulir merupakan dokumen yang penting dalam instansi sehingga harus disimpan dengan baik. Formulir dapat bersifat *hardcopy/softcopy*. Jika dalam bentuk *softcopy* maka penyimpanan biasanya berada di komputer, sedangkan bentuk *hardcopy* maka penyimpanan biasanya di rak ataupun di lemari penyimpanan bukti transaksi.
2. Jurnal, merupakan pencatatan berupa debit dan kredit yang bersumber dari formulir. Pada kolom jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya digolongkan dalam akun-akun dan dimasukkan ke dalam kolom debit/kredit.
3. Buku besar, merupakan akun-akun yang dikelompokkan kemudian dilakukan penjumlahan nilai uang yang berikutnya berdasarkan akun-akun yang sudah dikelompokkan.
4. Buku pembantu, berguna untuk membantu merinci akun yang ada di buku besar. Buku pembantu ini terdiri dari akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening buku besar.

Laporan keuangan, merupakan hasil akhir proses akuntansi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang digunakan instansi untuk dilakukan pengambilan keputusan agar tercapainya tujuan instansi.

2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

A. Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa

Akuntabilitas menurut KBBI adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Novindra Dwi dan Nur Laila akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah seperti kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi hak dan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²⁴ Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa dan aparaturnya kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.

Adanya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk periode-periode sebelumnya.

Menurut Mustofa dalam jurnalnya menyatakan bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pada pasal 3 ayat 1 mengenai ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa prinsip pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah harus dikelola dengan tertib dan taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Ketentuan tersebut dimaksudkan adalah untuk keseluruhan dari

²⁴ Setiana, D. N., & Yuliani, "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

kegiatan perencanaan, penguasaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atau disebut dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.²⁵

Menurut Chabib Soleh dan Heru dalam Novia Syahputri menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.²⁶ Akuntabilitas tidak konkrit, namun harus ditentukan oleh hukum melalui perangkat prosedur yang spesifik mengenai masalah apa yang akan dipertanggungjawabkan. Tiga prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah prinsip transparansi dan keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip *Value for Money*.

Menurut Syahrudin Rasul dalam Elvira Zeyn mengemukakan bahwa salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas finansial, dimana mengharuskan lembaga publik untuk membuat laporan keuangan guna menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.²⁷ Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban bagi lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik. Secara ekonomis akuntabilitas keuangan sangat penting karena menjadi sorotan bagi masyarakat. Keharusan akuntabilitas dalam membuat laporan keuangan dapat menggambarkan bagaimana kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Oleh karena itu akuntabilitas sangat rentan jika bersangkutan dengan penyalahgunaan dana publik.

Dari pendapat-pendapat diatas maka disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan kesediaan para pengelola dana desa untuk menerima tanggungjawan atas apa yang

²⁵ Anies Iqbal Mustofa, "Pengaruh Penyajian Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang," *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia* 1, no. 2 (2012): 2, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.

²⁶ Novia Syahputri Saragih and Denny Kurnia, "Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desakabupaten," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA* (2019): 1–9.

²⁷ Elvira Zeyn, "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan," *Trikonomika* 10 No. 1 (2011): 52–62.

ditugaskan kepada mereka secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

B. Asas pengelolaan keuangan Desa

Menurut UU desa tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja desa, dan pengeluaran desa.

Adapun pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana terantum dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:²⁸

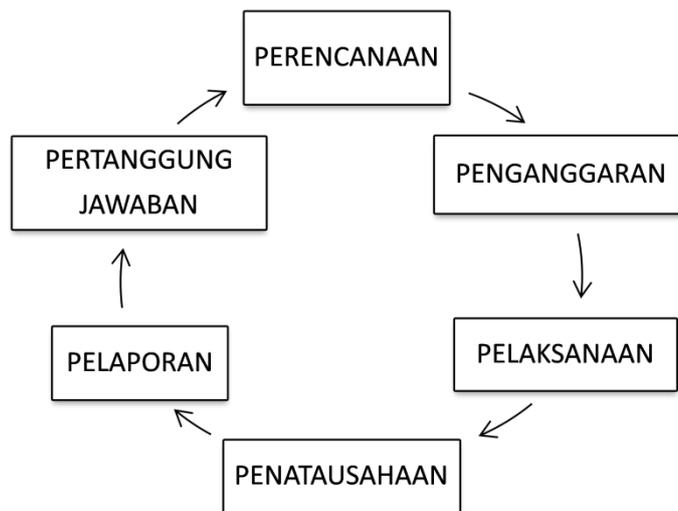
1. **Transparan**, yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa. selain itu asas ini juga membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Akuntabel**, yaitu wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

²⁸ Yoga Angger Wibowo, "Pengelolan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Uniska Law Review* 1, no. 1 (2020): 38.

4. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

C. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Terhitung dalam periode satu tahun anggaran dimulai dari Januari hingga Desember.



Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat enam tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Perencanaan

Pada tahapan ini perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana tempat, siapa pelaksana dan pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dalam dokumen perencanaan keuangan desa yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun dengan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. RPJMD dan RKPD dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. RPJMD mengacu kepada Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJMD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu setahun. RKPD memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKPD berisi evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola maupun kerjasama antar desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKPD menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

2. Penganggaran

Penganggaran dilaksanakan setelah RKPD ditetapkan, rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya ditetapkan dalam RKPD akan dijadikan pedoman untuk proses penganggaran. APBD adalah rencana anggaran tahunan pemerintah desa yang ditetapkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

3. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja terdiri dari:

- a. Prinsip pelaksanaan keuangan desa dalam pelaksanaan keuangan desa. Terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip tersebut diantaranya adalah penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun, khusus bagi desa yang belum memiliki

pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- b. Pelaksanaan penerimaan pendapatan. Yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah diluar/diatas desa. adapun pihak yang terkait dengan proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana seperti pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, pihak ketiga, penerima dana seperti bendahara desa, dan bank.
- c. Pelaksanaan pengeluaran/belanja. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat maupun provinsi/kabupaten/kota. Hal ini seluruhnya tercantum dalam RKPD yang pelaksanaannya diwujudkan melalui APBD. Setelah APBD ditetapkan dalam bentuk peraturan desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat operasional perkantoran yang diatur dalam keputusan kepala desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu penetapan APBD. Pelaksanaan APBD dilakukan dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan meliputi dua bagian yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa dipisahkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari

pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Pencairan dana cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai dengan peraturan desa yang mengatur hal tersebut. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan desa dipisahkan dan diperoleh dari realisasi penjualan aset/kekayaan desa kepada pihak ketiga.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 terkait dengan penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. bendahara desa wajib melakukan seluruh pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan melakukan pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas akan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan juga BPD.

Adapun laporan yang akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat adalah sebagai berikut:

- a. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBD.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan realisasi penggunaan dana desa.

Sedangkan pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

D. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa

Menurut Syahrudin Rasul dalam Elvira Zeyn akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tidak adanya pembocoran dana dan pemborosan serta mengharuskan lembaga untuk membuat laporan keuangan dengan menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Beberapa indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Rencana Keuangan (Proses Penganggaran), proses penganggaran dimulai dengan pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pendekatan penganggaran dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Pengajuan anggaran harus disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.
2. Pelaksanaan dan Pembiayaan Kegiatan, dalam pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, dan efisien. Pada pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan juga

sumber pembiayaan kegiatan harus jelas agar proses kegiatan berjalan dengan lancar.

3. Melakukan Evaluasi atas Kinerja Keuangan, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam pembuatan keputusan. Evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan keuangan sangat diperlukan agar pemerintah terpacu dalam meningkatkan kinerja ditahun yang akan datang. Perhitungan capaian kinerja keuangan dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Laporan Keuangan, dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan desa nantinya akan diperiksa oleh inspektorat dan pemerintah desa menggunakan analisis laporan keuangan berdasarkan SAP untuk diketahui keberhasilan dari pelaksanaan penganggaran.

2.1.5. Implementasi Ayat Terkait Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa, Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas dan terperinci didalam Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu yang menjadi pedoman untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitu juga dengan akuntabilitas sebagai bentuk pengelolaan keuangan desa.

Transparansi anggaran merupakan salah satu bentuk *Tabligh* yaitu menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan. Dengan kata lain harus jujur dalam berbicara, jujur dalam niat dan kemauan, jujur dalam perencanaan dan pelaksanaan, jujur dalam tindakan, dan jujur dalam merealisasikan. Dalam pengelolaan keuangan desa kejujuran tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam

pandangan islam menghindari transparansi berarti menyembunyikan kebenaran dan hal itu dapat menghapus pahala ibadah.

Dengan adanya kejujuran dapat mencerminkan bahwa pemegang kekuasaan yang kita sebut sebagai pemerintah mencontohkan sikap keterbukaan/kejujuran. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 101 yaitu:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قُلُوبًا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: “sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (QS. An-Nahl: 101)

Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai contoh sifat nabi adalah amanah dalam menjalankan tugas dan wewenang. Bentuk akuntabilitas dapat dilihat dari firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab: 72-73 yaitu:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikul lah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab:72-73)

Sebagaimana pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa juga memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai *Ulil Amri*, dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati penguasa agar terealisasikan pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan di segala bidang dalam lingkup pemerintahan desa. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa: 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa:59)

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

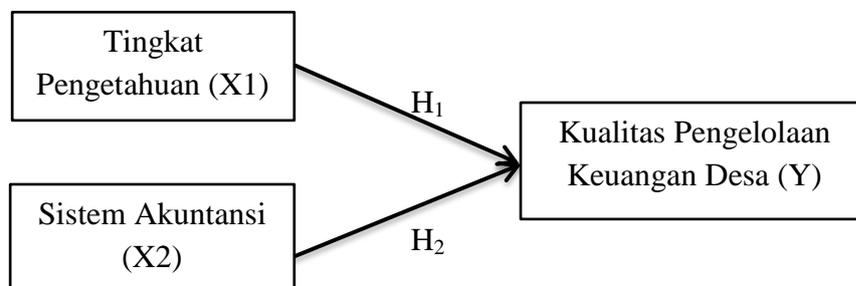
Tabel 2. 1 Berbagai Literatur Penelitian

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Munifaah Anaan (2020) “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”	Independen: Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: - Pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Kualitas aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2.	Rusdi Abdulkarim (2019) “Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.”	Independen: Kemampuan Aparat Desa Dependen: Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: - Kemampuan aparatur desa dilihat dari faktor pendidikan, pelatihan, dan pengalaman berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.
3.	Novia Syahputri Saragih dan Denny Kurnia (2019) “Pengaruh Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.”	Independen: Peran Perangkat Desa, dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: - Perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. - Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4.	Widya Yulianti, Kamaliah, dan Rasuli (2019) “Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, dan Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa.”	Independen: Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, dan Internal Control Dependen: Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: - Kompetensi aparat pengelola keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan desa. - Teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan desa. - Sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan desa. - Internal Control berpengaruh

			terhadap akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa.
5.	Neneng Sri Suprihatin dan Arinda Ayu Ananthi (2019) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.”	<u>Independen:</u> Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi <u>Dependen:</u> Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: - Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. - Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
6.	Fatimah Azmi Nainggolan (2018) “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.”	<u>Independen:</u> Peran Perangkat Desa <u>Dependen:</u> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: - Peran perangkat desa berperan atau berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
7.	Husnurrosyidah dan Ginanjar Suendro (2018) “Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa”	<u>Independen:</u> Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi <u>Dependen:</u> Penyalahgunaan Dana Desa	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: - Sistem akuntansi berpengaruh terhadap penyalahgunaan dana desa. - Kompetensi akuntansi berpengaruh terhadap penyalahgunaan dana desa.
8.	Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliani (2017) “Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.”	<u>Independen:</u> Pemahaman dan Peran Perangkat Desa <u>Dependen:</u> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: - Pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. - Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
9.	Neny Tri Indrianasari (2017) “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”	<u>Independen:</u> Peran Perangkat Desa <u>Dependen:</u> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: - Peran perangkat desa cukup berperan atau berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, selain itu secara keseluruhan pelaksanaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

10.	Ibnu Wardana (2016) “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.”	<u>Independen:</u> Penyajian Laporan keuangan, Akseibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal <u>Dependen:</u> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa: - Pada penyajian laporan keuangan, akseibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa - Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
-----	--	---	---

2.3. Kerangka Berpikir dan Hipotesis



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sebagai perangkat desa yang berkedudukan dalam membantu kepala desa yang terbentuk dalam pemerintahan desa, penting untuk memiliki pengetahuan terutama dalam hal keuangan desa. pentingnya pengetahuan kepala desa dan aparatur desa diharapkan dapat membangun dan mengelola desa dengan lebih baik terkhususnya pada pengelolaan keuangan desa. karena kualitas laporan keuangan sebuah desa berhubungan dengan kinerja kepala desa dan aparaturnya.

Menurut Munifaah Anaan (2020) pada penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Diani (2016) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama dengan mengerti dan memahami proses pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan

yang berlaku. Rusdi Abdulkarim (2019) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya. Maka dari itu, peneliti menduga bahwasannya besarnya usaha seseorang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan berbeda-beda dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Tingkat pengetahuan seseorang dapat meningkatkan kualitas hasil kerja, sehingga hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H₁: *Tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.*

Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, hal ini dibuktikan dengan nota-nota yang kemudian dilakukan pencatatan hingga pelaporan keuangan sehingga menghasilkan informasi dan kemudian akan digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. adanya sistem akuntansi keuangan desa yang transparan dan relevan menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa lebih baik lagi sehingga dapat memaksimalkan laporan keuangan desa.

Menurut Novia Syahputri dan Denny Kurniawan (2019) pada penelitiannya menyatakan bahwa sistem akuntansi desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. hasil ini sejalan dengan penelitian Muhammad Ismail (2016) yang menunjukkan bahwa desa berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada publik. Pengelolaan keuangan desa merupakan batu loncatan bagi pembangunan sistem akuntansi keuangan desa yang lebih baik. Pada penelitian Widya Yulianti Kamaliah dan Rasuli (2019) mengungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu, peneliti menduga semakin baik sistem akuntansi keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel, begitupun sebaliknya jika sistem akuntansi keuangan desa

tidak baik maka pengelolaan keuangan desa akan menjadi tidak berkualitas.

Sehingga peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistika.²⁹ Adapun penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggambarkan solusi dari permasalahan berdasarkan data. Namun, data yang ada tidak termasuk data buatan yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data, kegiatan yang dilakukan adalah penyebaran kuesioner/angket. Penelitian dengan metode deksriptif memungkinkan peneliti membangun hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi dan teori secara valid dan menyeluruh.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari responden melalui kuesioner/angket. Kuesioner merupakan alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan untuk memperoleh jawaban dari responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui mediator seperti jurnal, buku, artikel, dan statistik.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari 25 April 2022 sampai dengan selesai di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Berikut adalah desa-desa yang berada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdiri dari:

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, ed. Maman Abd. Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Tabel 3. 1 Daftar Desa di Kecamatan Kuta Alam

Kecamatan	Desa
Kuta Alam	Desa Peunayong
	Desa Mulia
	Desa Laksana
	Desa Keuramat
	Desa Beurawe
	Desa Kuta Alam
	Desa Kota Baru
	Desa Bandar baru
	Desa Lampulo
	Desa Lamdingin
	Desa Lambaro Skep

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.³⁰ Populasi pada penelitian ini yaitu desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Kuta Alam yang terdiri dari:

- a. Desa Peunayong
- b. Desa Mulia
- c. Desa Laksana
- d. Desa Keuramat
- e. Desa Kuta Alam
- f. Desa Beurawe
- g. Desa Kota Baru
- h. Desa Bandar Baru
- i. Desa Lampulo
- j. Desa Lamdingin
- k. Desa Lambaro Skep

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³¹ Pada penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan teknik sampel yang digunakan adalah *Sampling Jenuh* yaitu teknik sampel dimana semua anggota populasi dijadikan penelitian.³² Sampel pada penelitian ini adalah 33 responden perangkat desa diseluruh desa yang berada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdiri dari:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Keuangan Desa

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian ini, ada beberapa cara yang dilakukan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun cara atau teknik yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Observasi, yaitu dengan cara datang langsung ke lokasi atau ke setiap desa di Kecamatan Kuta Alam guna memperoleh data realisasi dana desa dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
2. Kuesioner/Angket, yaitu dengan menyebarkan atau membagikan kuesioner/angket kepada kepala desa, sekretaris, dan bagian keuangan atau bendahara di setiap desa di Kecamatan Kuta Alam. Kuesioner/angket yang disebar menggunakan skala likert. Adapun dalam pembuatan kuesioner peneliti memberikan alternatif skor pada masing-masing jawaban pernyataan. Berikut adalah alternatif jawaban dalam penelitian ini:

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Tabel 3. 2 Alternatif Jawaban

No	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Netral	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

3.5. Variabel dan Definisi Operasional Data

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dan orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³³ Variabel penelitian merupakan bagian dari subjek penelitian dengan objek yang mencakup hasil pelaksanaan penelitian secara menyeluruh. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel dengan rincian dua variabel independen dan satu variabel dependen.

1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen merupakan variabel yang sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen ditunjukkan kepada tingkat pengetahuan sebagai X1 dan sistem akuntansi sebagai X2.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang sering disebut dengan variabel *output* atau variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini variabel dependen ditunjukkan kepada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai variabel Y.

Definisi operasional adalah kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur.³⁴ Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

³³ Ibid.

³⁴ Zulfanef, *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

Tabel 3. 3 Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Tingkat Pengetahuan (X1)	Literasi keuangan merupakan kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep dan dimensi literasi keuangan untuk merubah pengetahuan secara tepat kedalam perilaku. ³⁵	Dimensi pengetahuan (menurut Huston,2010)	Likert
		Dimensi aplikasi (menurut Huston,2010)	
Sistem Akuntansi (X2)	Sistem akuntansi adalah kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang akan digunakan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. ³⁶	Pengidentifikasian (formulir) (menurut Sujarweni,2020)	Likert
		Pengukuran (jurnal, buku besar, buku pembantu) (menurut Sujarweni,2020)	
		Laporan keuangan (menurut Sujarweni,2020)	
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tidak adanya pemborosan dan kebocoran dana, serta mengharuskan lembaga untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. ³⁷	Perumusan rencana (proses penganggaran) (Menurut Zeyn, 2011)	Likert
		Pelaksana dan pembiayaan (Menurut Zeyn, 2011)	
		Evaluasi atas kinerja keuangan (Menurut Zeyn, 2011)	
		Pelaksanaan pelaporan keuangan (Menurut Zeyn, 2011)	

³⁵ Huston, "Measuring Financial Literacy."

³⁶ Sujarweni, *Sistem Akuntansi*.

³⁷ Zeyn, "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan."

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Adapun proses pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan hasil penelitian yang valid, apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.³⁸ Uji validitas digunakan untuk valid atau tidaknya sebuah kuesioner/angket. Kuesioner/angket dapat dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner/angket dapat mengungkapkan apa yang diukur oleh angket.

Pada riset penelitian, perhitungan item validitas dikaji memakai program komputer IBM SPSS *Statistic* 22. Hasil perhitungan akan ditimbang dengan *critical value*. Pada tabel ini nilai r dengan signifikansi 5% dari jumlah sampel yang ada. Apabila hasil perhitungannya lebih besar dari *critical value* maka instrumen penelitian dikatakan valid. Sebaliknya, jika nilai item kurang dari *critical value* maka instrumen penelitian dikatakan tidak valid.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan hasil penelitian yang reliabel, apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.³⁹ Uji reliabilitas merupakan alat uji yang dapat mengukur kuesioner/angket melalui indikator dari variabel. Kuesioner/angket dapat dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.

Pada penelitian ini, penakaran reliabilitas dilakukan melalui langkah *one shoot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran dilakukan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

³⁹ Ibid.

hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban dan pernyataan. SPSS menyediakan fasilitas untuk menakar reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach alpha* $>0,60$.

3.6.3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴⁰ Dengan kata lain analisis deskriptif dapat diartikan sebagai metode yang menggambarkan data penelitian.

3.6.4. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan teknik membangun dan menciptakan garis lurus untuk membuat interpretasi, agar penafsiran tersebut tepat maka persamaan yang digunakan untuk menafsirkan juga harus tepat. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh pada penelitian berdistribusi normal atau tidak, karena data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah uji normalitas menggunakan metode *One Sample Kolmogorov Smirnov* atau grafik normal P-P Plot. Uji normalitas dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data sumber diagonal pada grafik P-P Plot *of regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut dapat dikatakan normal.⁴¹ Sebaliknya apabila titik-titik menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal, maka dapat dikatakan data tidak terdistribusi normal. Sedangkan metode uji

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, Cv. Wade Group, 2016.

one sample Kolmogorov Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak apabila data residual melebihi nilai signifikansi diatas 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Pengkajian pada multikolinearitas dilaksanakan guna mengidentifikasi adakah korelasi antar variabel bebas. Apabila terjadi, berarti sangat sukar untuk memutuskan variabel bebas mana yang memberi pengaruh variabel terikat. Dari variabel independen jika korelasi mendekati +1 atau -1 maka disimpulkan persamaan regresi tidak sah dipakai dalam persamaan. Dalam mengidentifikasi adanya multikolinearitas, apabila *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 maka model terhindar dari multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas, pada umumnya sering terjadi pada model-model yang memakai data *cross section* daripada *time series*. Tetapi tidak berarti model-model yang menggunakan data *time series* terhindar dari gejala heterokedastisitas. Pada riset penelitian ini akan dilaksanakan pengkajian heterokedastisitas dengan memakai metode Scatterplots. Pada metode ini terdapat ciri-ciri yang menunjukkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas yaitu titik-titik menyebar diatas atau dibawah angka 0, lalu penyebaran titi-titik tidak berpola atau membentuk pola gelombang melebar kemudian menyempit setelahnya melebar kembali.

3.6.5. Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Pada pengujian regresi linear berganda difungsikan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu tingkat pengetahuan (X_1) dan sistem akuntansi (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Alat uji yang dipakai pada riset ini ialah regresi linear berganda. Yaitu memakai persamaan umum regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen/ variabel terikat

a = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien Regresi

X₁, X₂ = Variabel independen 1 dan 2 (tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi)

e = Error

1. Uji t

Uji t digunakan untuk mengidentifikasi keandalan serta arti dari nilai koefisien regresi, dimana mampu disimpulkan adalah pengaruh variabel tingkat pengetahuan (X₁) dan sistem akuntansi (X₂) pada variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y), signifikan atau tidak. Adapun karakteristik yang digunakan yaitu:

- a. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis ditolak, dan disimpulkan masing-masing variabel tingkat pengetahuan (X₁) dan sistem akuntansi (X₂) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).
- b. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis diterima, dan disimpulkan masing-masing variabel tingkat pengetahuan (X₁) dan sistem akuntansi (X₂) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

2. Uji F

Uji F difungsikan mengetes pengaruh menurut persamaan antara tingkat pengetahuan (X₁) dan sistem akuntansi (X₂) berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Adapun kriteria pengujian yang digunakan pada uji F yaitu:

- a. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka keputusannya adalah hipotesis ditolak, artinya masing-masing variabel tingkat pengetahuan (X₁) dan sistem akuntansi (X₂) secara bersamaan

tidak memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

b. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka keputusannya adalah hipotesis diterima, artinya masing-masing variabel tingkat pengetahuan (X1) dan sistem akuntansi (X2) secara bersamaan terdapat pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

3. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk menakar sebagaimana jauh kapabilitas model dalam memaknakan ragam variabel dependen. Pengkajian koefisien determinasi merupakan kajian untuk mengidentifikasi seberapa besar keterlibatan variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya, angka yang tertera mampu menakar seberapa rapatkah garis regresi yang diprediksi dengan data sebenarnya. Persamaan regresi yang bagus disahkan oleh R^2 nya yang memiliki nilai nol dan satu.

Rumus Koefisien Determinasi:

$$R2 = r2 \times 100\%$$

Keterangan:

$R2$ = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyajian Data Penelitian

4.1.1. Gambaran Objek Penelitian

1. Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1956 sebagai daerah otonom dalam Provinsi Aceh. Permulaan Kota Banda Aceh hanya terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayah 11,08 km.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh, terjadi perluasan wilayah menjadi 61,36 km dengan pemekaran dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Meuraxa.

Pembentukan Kecamatan Kuta Alam awalnya mencakup 17 desa dengan ibukota Kecamatan Desa Bandar Baru. Namun perubahan peraturan daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja yang baru maka dibentuklah kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata. Sebagian pada wilayah Kuta Alam berkurang dengan dibentuknya kecamatan baru yaitu Kecamatan Kuta Raja sebagai pemekaran dari Kecamatan Kuta Alam. Hingga saat ini Kecamatan Kuta Alam terdiri dari 2 mukim, 11 desa, dan 57 dusun.

Adapun 11 desa yang berada di Kecamatan Kuta Alam yaitu:

Tabel 4. 1 Desa-Desa di Kecamatan Kuta Alam

Kecamatan	Desa	
Kuta Alam	1.	Desa Peunayong
	2.	Desa Mulia
	3.	Desa Laksana
	4.	Desa Keuramat
	5.	Desa Beurawe
	6.	Desa Kuta Alam
	7.	Desa Kota Baru
	8.	Desa Bandar baru
	9.	Desa Lampulo
	10.	Desa Lamdingin
	11.	Desa Lambaro Skep

2. Visi dan Misi Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Adapun visi dan misi Kecamatan Kuta Alam adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Visi dan Misi Kecamatan Kuta Alam

Visi	Misi
Menjadikan Kecamatan Kuta Alam yang terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta transparan demi terwujudnya Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah Islam.	Menciptakan dan menumbuhkan budaya islami di tengah-tengah masyarakat diantara keberagaman suku, adat istiadat, dan agama.
	Memberikan pelayanan administrasi serta informasi yang terbaik dan terbuka bagi masyarakat melalui profesionalisme aparatur kecamatan.
	Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembenahan di bidang pembangunan, penerbitan, dan keamanan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan potensi yang ada di Kecamatan Kuta Alam.

4.1.2. Deskripsi Responden

Deskripsi merupakan gambaran keadaan atau kondisi responden berupa informasi tambahan untuk menguatkan hasil penelitian. Pada penelitian ini, penyebaran kuesioner dibagikan kepada 33 responden. adapun karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil data yang disebar dan diolah dengan penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa persentase karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu:

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	20	60,6%
Perempuan	13	39,4%
Total	33	100%

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 33 responden di Kecamatan Kuta Alam, responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang atau 60,6% dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang atau 39,4%. Dengan demikian jumlah responden terbanyak berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang atau 60,6%.

2. Berdasarkan Usia

Hasil data yang disebar dan diolah dengan penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa persentase karakteristik responden berdasarkan usia yaitu:

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
21 - 30 tahun	2	6,1%
31 - 40 tahun	15	45,5%
41 - 50 tahun	8	24,2%
51 - 60 tahun	5	15,2%
61 - 70 tahun	3	9,1%
Total	33	100%

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas dari 33 responden di Kecamatan Kuta Alam, responden dengan usia 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 6,1%, responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 15 orang atau 45,5%, responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 8 orang atau 24,2%, responden dengan usia 51-60 tahun sebanyak 5 orang atau 15,2%,

responden dengan usia 61-70 tahun sebanyak 3 tahun atau 9,1%. Dengan demikian jumlah responden terbanyak berdasarkan usia adalah 31-40 tahun sebanyak 15 orang atau 45,5%.

3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Hasil data yang disebarakan dan diolah dengan penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa persentase karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu:

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	8	24,2%
D3	5	15,2%
S1	20	60,6%
Total	33	100%

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas dari 33 responden di Kecamatan Kuta Alam, responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 8 orang atau 24,2% , responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 5 orang atau 15,2%, responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 20 orang atau 60,6%. Dengan demikian jumlah responden terbanyak berdasarkan pendidikan terakhir adalah lulusan S1 sebanyak 20 orang atau 60,6%.

4. Berdasarkan Jabatan

Hasil data yang disebarakan dan diolah dengan penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa persentase karakteristik berdasarkan jabatan yaitu:

Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kepala Desa	11	33,3%
Sekretaris Desa	11	33,3%
Keuangan/Bendahara Desa	11	33,3%
Total	33	100%

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas dari 33 responden di Kecamatan Kuta Alam, masing-masing desa memiliki 1 orang kepala desa, 1 orang

sekretaris desa, dan 1 orang bagian keuangan desa atau bendahara desa. Dengan demikian jumlah keseluruhan responden berdasarkan jabatan dari setiap desa adalah 11 orang atau 33,3%.

5. Berdasarkan Masa Kerja

Hasil data yang disebarkan dan diolah dengan penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa persentase berdasarkan masa kerja yaitu:

Tabel 4. 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
< 1 tahun	3	9,1%
1 -5 tahun	14	42,4%
6 - 10 tahun	8	24,2%
> 10 tahun	8	24,2%
Total	33	100%

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas dari 33 responden di Kecamatan Kuta Alam, responden dengan masa kerja < 1 tahun sebanyak 3 orang atau 9,1%, responden dengan masa kerja 1-5 tahun sebanyak 14 orang atau 42,4%, responden dengan masa kerja 6-10 tahun sebanyak 8 orang atau 24,2%, dan responden dengan masa kerja > 10 tahun sebanyak 8 orang atau 24,2%. Dengan demikian jumlah responden terbanyak berdasarkan masa kerja adalah selama 1-5 tahun sebanyak 14 orang atau 42,4%.

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini hasil penelitian berdasarkan kriteria variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Variabel Tingkat Pengetahuan (X1)

Hasil data yang disebarkan dan diolah dengan penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa persentase berdasarkan variabel tingkat pengetahuan yaitu:

Tabel 4. 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Variabel X1

Tingkat Pengetahuan	Jumlah			Total	Persentase			Total
	S	SS	N		S	SS	N	
X1.1	19	14		33	57,6%	42,4%		100%
X1.2	16	17		33	48,5%	51,5%		100%
X1.3	19	13		33	57,6%	42,4%		100%
X1.4	14	19		33	42,4%	57,6%		100%
X1.5	11	21	1	33	33,3%	63,6%	3,0%	100%

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas dari 33 responden di Kecamatan Kuta Alam, responden yang menjawab soal X1.1 sebanyak 19 orang atau 57,6% menjawab setuju (S), dan sebanyak 14 orang atau 42,4% menjawab sangat setuju (SS). Responden yang menjawab soal X1.2 sebanyak 16 orang atau 48,5% menjawab S, dan sebanyak 17 orang atau 51,5% menjawab SS. Responden yang menjawab soal X1.3 sebanyak 19 orang atau 57,6% menjawab S, dan sebanyak 13 orang atau 42,4% menjawab SS. Responden yang menjawab soal X1.4 sebanyak 14 orang atau 42,4% menjawab S, dan sebanyak 19 orang atau 57,6% menjawab SS. Dan responden yang menjawab soal X1.5 sebanyak 11 orang atau 33,3% menjawab S, sebanyak 21 orang atau 63,6% menjawab SS, dan sebanyak 1 orang atau 3,0% menjawab netral (N).

2. Berdasarkan Variabel Sistem Akuntansi (X2)

Hasil data yang disebarakan dan diolah dengan penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa persentase berdasarkan variabel sistem akuntansi yaitu:

Tabel 4. 9 Karakteristik Responden Berdasarkan Variabel X2

Sistem Akuntansi	Jumlah			Total	Persentase			Total
	S	SS	N		S	SS	N	
X2.1	17	16		33	51,5%	48,5%		100%
X2.2	18	15		33	54,5%	45,5%		100%
X2.3	16	16		33	48,5%	48,5%	3,0%	100%

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas dari 33 responden di Kecamatan Kuta Alam, responden yang menjawab soal X2.1 sebanyak 17 orang atau 51,5% menjawab S, dan sebanyak 16 orang atau 48,5% menjawab SS. Responden yang menjawab soal X2.2 sebanyak 18 orang atau 54,5% menjawab S, dan sebanyak 15 orang atau 45,5% menjawab SS. Dan responden yang menjawab soal X2.3 sebanyak 16 orang atau 48,5% menjawab S, dan sebanyak 16 orang atau 48,5% juga menjawab SS.

3. Berdasarkan Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Hasil data yang disebarakan dan diolah dengan penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa persentase berdasarkan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu:

Tabel 4. 10 Karakteristik Responden Berdasarkan Variabel Y

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah			Total	Persentase			Total
	S	SS	N		S	SS	N	
Y.1	16	16	1	33	48,5%	48,5%	3,0%	100%
Y.2	14	19		33	42,4%	57,6%		100%
Y.3	19	14		33	57,6%	42,4%		100%
Y.4	20	13		33	60,6%	39,4%		100%
Y.5	21	12		33	63,6%	36,4%		100%
Y.6	15	16	2	33	45,5%	48,5%	6,1%	100%
Y.7	21	9	3	33	63,6%	27,3%	9,1%	100%

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas dari 33 responden di Kecamatan Kuta Alam, responden yang menjawab soal Y.1 sebanyak 16 orang atau 48,5% menjawab S, dan sebanyak 16 orang atau 48,5% juga menjawab SS. Responden yang menjawab soal Y.2 sebanyak 14 orang atau 42,4% menjawab S, dan sebanyak 19 orang atau 57,6% menjawab SS. Responden yang menjawab soal Y.3 sebanyak 19 orang atau 57,6% menjawab S, dan sebanyak 14 orang atau 42,4% menjawab SS. Responden yang menjawab soal Y.4 sebanyak 20 orang atau 60,6% menjawab S, dan sebanyak 13 orang atau 39,4% menjawab SS. Responden yang menjawab soal Y.5 sebanyak 21 orang atau 63,6%

menjawab soal S, dan sebanyak 12 orang atau 36,4% menjawab SS. Responden yang menjawab soal Y.6 sebanyak 15 orang atau 45,5% menjawab S, sebanyak 16 orang atau 48,5% menjawab SS, dan sebanyak 2 orang atau 6,1% menjawab N. dan responden yang menjawab soal Y.7 sebanyak 21 orang atau 63,6% menjawab S, sebanyak 9 orang atau 27,3% menjawab SS, dan sebanyak 3 orang atau 9,1% menjawab N.

4.2. Analisis dan Interpretasi Data

4.2.1. Uji Validitas

Teknik uji validitas item dengan korelasi pearson yaitu dengan cara mengkorelasi skor item dengan skor totalnya. Skor total adalah penjumlahan seluruh item pada satu variabel. Pada penelitian ini pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Apabila nilai positif r hitung $\geq r$ tabel maka dapat dinyatakan valid, dan jika r hitung $< r$ tabel maka item dinyatakan tidak valid. Berikut adalah hasil uji validitas untuk penelitian ini dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics versi 22*.

Tabel 4. 11 Uji Validitas

Variabel Penelitian	No. Soal	Nilai signifikan	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket.
Tingkat Pengetahuan (X1)	X1.1	0,000	0,594	0,344	Valid
	X1.2	0,000	0,667	0,344	Valid
	X1.3	0,000	0,764	0,344	Valid
	X1.4	0,000	0,774	0,344	Valid
	X1.5	0,000	0,744	0,344	Valid
Sistem Akuntansi (X2)	X2.1	0,000	0,807	0,344	Valid
	X2.2	0,000	0,830	0,344	Valid
	X2.3	0,000	0,787	0,344	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Y.1	0,000	0,749	0,344	Valid
	Y.2	0,000	0,714	0,344	Valid
	Y.3	0,000	0,789	0,344	Valid
	Y.4	0,000	0,745	0,344	Valid
	Y.5	0,000	0,702	0,344	Valid
	Y.6	0,006	0,467	0,344	Valid
	Y.7	0,000	0,669	0,344	Valid

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji validitas, diperoleh hasil nilai signifikansi $< 0,05$, dapat dilihat pada variabel tingkat pengetahuan ($X1$), sistem akuntansi ($X2$), dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) pernyataan $X1.1$ sampai $X1.5$ nilai signifikansi kurang dari $\leq 0,05$ maka disimpulkan bahwa item pernyataan dinyatakan valid. Cara lain untuk menentukan validitas item pernyataan yaitu dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa pada variabel tingkat pengetahuan ($X1$), sistem akuntansi ($X2$), dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) bahwa nilai r hitung $\geq r$ tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada penelitian ini dikatakan valid.

4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk skala rentangan (skala likert) adalah *cronbach alpha*. Untuk menentukan apakah instrumen penelitian reliabel atau tidak yaitu dengan menggunakan batasan 0,6. Apabila nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel, sebaliknya jika nilai reliabilitas lebih dari 0,6 maka instrumen penelitian diterima atau reliabel.

Tabel 4. 12 Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	<i>N of Item</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Tingkat Pengetahuan ($X1$)	5	0,752	<i>Reliabel</i>
Sistem Akuntansi ($X2$)	3	0,731	<i>Reliabel</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	7	0,808	<i>Reliabel</i>

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas dengan metode *cronbach alpha*, diperoleh hasil bahwa nilai *cronbach alpha* pada variabel tingkat pengetahuan ($X1$) adalah 0,752, variabel sistem akuntansi ($X2$) adalah 0,731, dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) adalah 0,808. Dengan demikian dapat

disimpulkan uji reliabilitas pada penelitian ini dikatakan reliabel karena nilai $> 0,6$

4.2.3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran setiap variabel di dalam penelitian. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif untuk penelitian ini dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics versi 22*:

Tabel 4. 13 Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pengetahuan	33	19	25	22.55	1.822
Sistem Akuntansi	33	11	15	13.39	1.273
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	33	27	35	30.82	2.567
Valid N (listwise)	33				

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada variabel tingkat pengetahuan (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maximum sebesar 25, nilai mean 22, 55 dan standar deviasi sebesar 1,822. Pada variabel sistem akuntansi (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maximum sebesar 15, nilai mean 13,39, dan standar deviasi sebesar 1,273. Dan pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) memiliki nilai minimum sebesar 27, nilai maximum sebesar 35, nilai mean 30,82, dan standar deviasi sebesar 2,567.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini metode uji normalitas yang digunakan adalah *one sample Kolmogorov Smirnov* dan P-P Plot. Pada metode *one sample Kolmogorov Smirnov* untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak dapat dilihat pada nilai signifikan. Residual yang bersidtribusi normal apabila

nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil data yang diolah dengan penyebaran kuesioner untuk mengetahui uji normalitas yaitu:

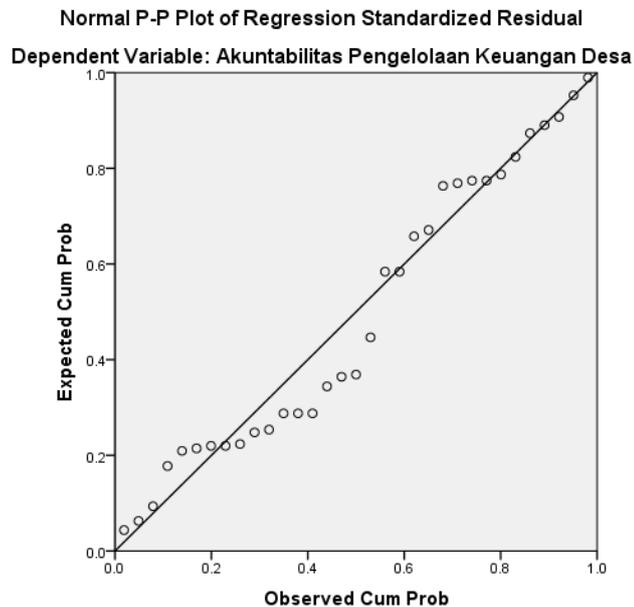
**Tabel 4. 14 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.96650320
Most Extreme Differences	Absolute	.150
	Positive	.150
	Negative	-.104
Test Statistic		.150
Asymp. Sig. (2-tailed)		.056^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction		

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas menggunakan *one sample Kolmogorov Smirnov*, diperoleh hasil sebesar 0,056. Dengan demikian apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 dapat disimpulkan nilai residual terdistribusi normal.

Cara lain untuk menentukan uji normalitas adalah menggunakan uji normalitas residual dengan metode grafik P-P Plot. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, apabila titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual disebut normal.



Gambar 4. 1 Uji Normalitas P-P Plot

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian hasil dapat disimpulkan jika nilai residual pada penelitian ini terdistribusi normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam regresi memiliki linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Dasar keputusan metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)* pada model regresi. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai *VIF* dan *tolerance*, apabila nilai *VIF* kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 15 Uji Multikolinearitas

	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Tingkat Pengetahuan (X1)	0,970	1,031
Sistem Akuntansi (X2)	0,970	1,031

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas, diperoleh hasil nilai *tolerance* dari kedua variabel independen (*X*) adalah $0,970 > 0,10$. Kemudian nilai *VIF* sebesar $1,031 < 10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

4.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk uji heterokedastisitas adalah metode glejser dan metode grafik Scatterpolt. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner untuk mengetahui uji heterokedastisitas menggunakan metode uji glejser yaitu:

Tabel 4. 16 Uji Heterokedastisitas Metode Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.460	2.607		-.560	.580
	Tingkat Pengetahuan	.029	.097	.055	.305	.763
	Sistem Akuntansi	.185	.138	.240	1.336	.191

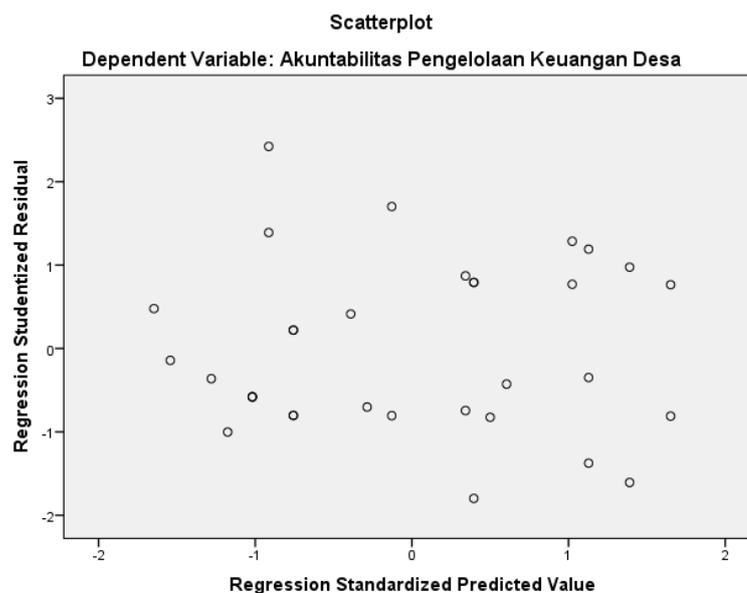
a. Dependent Variable: RES2

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa hasil uji heterokedastisitas dengan metode glejser diperoleh hasil nilai signifikan kedua variable independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

Cara lain untuk menentukan uji heterokedastisitas adalah menggunakan metode grafik Scatterplot dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Dasar kriteria dalam pengambilan keputusan metode ini adalah melihat titik-titik pada grafik. Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit) maka terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4. 2 Uji Heterokedastisitas Scatterplot

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode grafik Scatterplot diperoleh hasil titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini, alat yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi berganda menggunakan alat bantu IBM SPSS *Statistics* versi 22. Studi riset yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa). berikut adalah hasil uji regresi linear berganda:

**Tabel 4. 17 Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.189	5.401		1.331	.193
	Tingkat Pengetahuan	.432	.200	.307	2.159	.039
	Sistem Akuntansi	1.037	.286	.514	3.621	.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan hasil analisis regresi ini diperoleh hasil pada tabel diatas, model regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,187 + 0,432X_1 + 1,037X_2 + e$$

Adapun tafsiran dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah:

- a. Nilai konstanta regresi yaitu 7,187 yang berarti positif. Artinya, jika variabel tingkat pengetahuan (X_1), dan sistem akuntansi (X_2) adalah 0 maka nilai variabel tersebut dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah 7,187.
- b. Nilai koefisien regresi pada variabel tingkat pengetahuan adalah 0,432. Artinya jika variabel tingkat pengetahuan ditingkatkan, maka preferensi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan meningkat sebesar 0,432.
- c. Nilai koefisien regresi pada variabel sistem akuntansi adalah 1,037. Artinya jika variabel sistem akuntansi ditingkatkan, maka preferensi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan meningkat sebesar 1,037.

4.4.1. Uji Hipotesis

1. Uji *t*

Uji *t* digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan kriteria pengujian, apabila *t* hitung > *t* tabel maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila *t* hitung < *t* tabel maka hipotesis ditolak. Cara lain untuk mengetahui uji *t* adalah dengan melihat nilai signifikan yaitu apabila nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hasil data yang diolah melalui penyebaran kuesioner untuk mengetahui uji *t* pada penelitian ini yaitu:

**Tabel 4. 18 Uji *t*
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.189	5.401		1.331	.193
	Tingkat Pengetahuan	.432	.200	.307	2.159	.039
	Sistem Akuntansi	1.037	.286	.514	3.621	.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: SPSS versi 22

Hipotesis pengujian dengan menggunakan uji *t* adalah:

*H*₁: Tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

*H*₂: Sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pada penelitian ini diketahui jika nilai *t* tabel adalah 2,042. Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan memperoleh nilai *t* hitung sebesar 2,159 > 2,042 dan nilai signifikan sebesar 0,039 < 0,05 artinya terdapat pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen. Pada variabel sistem akuntansi menunjukkan bahwa nilai *t* hitung sebesar 3,621 > 2,042 dan nilai

signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pengetahuan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Uji *F*

Uji *F* yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Adapun kriteria pengujian yaitu apabila nilai *F* hitung $> F$ tabel maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila *F* hitung $< F$ tabel maka hipotesis ditolak. Cara lain untuk mengetahui uji *F* adalah dengan melihat nilai signifikan yaitu apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hasil data yang diolah melalui penyebaran kuesioner untuk mengetahui uji *F* pada penelitian ini yaitu:

**Tabel 4. 19 Uji *F*
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	87.161	2	43.580	10.565	.000 ^b
	Residual	123.748	30	4.125		
	Total	210.909	32			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa						
b. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi, Tingkat Pengetahuan						

Sumber: SPSS versi 22

Hipotesis pengujian menggunakan uji *F* adalah:

H3: Tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pada penelitian ini diketahui jika nilai *F* tabel adalah 3,32. Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi memperoleh nilai *F* hitung sebesar 10,565 $> 3,32$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pada variabel tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi secara bersamaan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan (R^2) digunakan sebagai pengukur untuk mengetahui apakah model regresi yang terestimasi baik atau tidak. Angka yang dimunculkan pada uji koefisien determinasi digunakan sebagai pengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data yang sesungguhnya. Persamaan regresi yang baik ditentukan oleh R^2 yang memiliki nilai antara nol dan satu. Hasil data yang diolah pada penelitian untuk mengetahui uji koefisien determinan (R^2) adalah dengan melihat nilai *R Square*.

Tabel 4. 20 Uji Koefisien Determinan (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.643 ^a	.413	.374	2.031

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi, Tingkat Pengetahuan

Sumber: SPSS versi 22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian koefisien determinasi, dapat disimpulkan bahwa *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,413 atau 41,3%. Dapat dilihat adanya pengaruh variabel tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi sebesar 41,3%. Jumlah selisih sisanya dipengaruhi oleh variabel atau konstruk lain diluar penelitian ini.

4.5. Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat 33 responden yang dilibatkan untuk memberikan informasi pada penelitian “Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Uji validitas menunjukkan hasil bahwa kuesioner/angket yang disebar kepada 33 responden memberikan hasil dan dinyatakan valid, karena semua item pernyataan memiliki r hitung $> r$ tabel atau tingkat signifikan $< 0,05$. Pada uji

reliabilitas juga memberikan hasil dan dinyatakan reliabel, dibuktikan dengan nilai *cronbach alpha* > 0,6 pada setiap variabel. Pada uji koefisien determinan atau uji R^2 hasil penelitian menunjukkan jika *R Square* sebesar 0,413 atau 41,3% yang artinya jika pengaruh variabel tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi sebanyak 41,3% dengan selisih sebesar 58,7% karena faktor lain yang tidak disebutkan pada penelitian ini.

Uji signifikan simultan atau uji *F*, menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh simultan pada variabel independen (tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa). dibuktikan dengan nilai *F* hitung > *F* tabel dengan nilai sebesar $10,565 > 3,32$ dan nilai taraf signifikan adalah $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian yang dikembangkan, secara ringkas disajikan pada tabel dibawah. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *IBM SPSS Statistics versi 22* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Tingkat Pengetahuan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Hipotesis Diterima
H2	Sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Hipotesis Diterima

1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan kuta Alam Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan perolehan hasil uji *t* dengan nilai *t* hitung sebesar 2,159 dan nilai *t* tabel sebesar 2,042 artinya $2,159 > 2,042$ dan nilai signifikan $0,39 < 0,05$. Maka disimpulkan bahwa variabel tingkat pengetahuan (*X1*) berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Y).

Berdasarkan sebaran kuesioner dan pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya. Pengetahuan merupakan fakta, informasi, dan keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan, baik secara teori maupun pemahaman praktik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusdi Abdulkarin (2019) yang menemukan bahwa pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Uraian ini mengukuhkan bahwa temuan penelitian ini merupakan dasar teoritik yang kuat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima atau terbukti jika tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan perolehan hasil uji t dengan nilai t hitung sebesar 3,621 dan nilai t tabel 2,042 artinya $3,621 > 2,042$ dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Maka disimpulkan bahwa sistem akuntansi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Y).

Berdasarkan sebaran kuesioner dan pengolahan data menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan keuangan desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan terkait

pengelolaan keuangan desa. Sistem komputerisasi ini akan memberikan kemudahan kepada kepala desa dan aparaturnya mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi, hingga pembuatan laporan keuangan semesteran dan tahunan. Hal dapat meningkatkan akuntabilitas publik, Partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Penggunaan sistem komputerisasi juga dapat menghemat waktu kepala desa dan aparatnya, sehingga bisa lebih menjalankan tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian konflik yang ada dimasyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novia Syahputri Saragih dan Denni Kurnia (2019) yang menemukan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. desa berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada publik. Pengelolaan keuangan desa merupakan batu loncatan bagi pembangunan sistem akuntansi keuangan desa yang lebih baik pula. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima atau terbukti jika sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

3. Pengaruh Tingkat pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi secara bersamaan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan perolehan hasil uji F dengan nilai F hitung sebesar 10,565 dan nilai F tabel sebesar 3,32 artinya $10,565 > 3,32$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan (X_1) dan sistem akuntansi (X_2) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Y).

Berdasarkan sebaran kuesioner dan pengolahan data menunjukkan bahwa lemahnya pengetahuan perangkat desa mengenai laporan keuangan dapat mempengaruhi keprofesionalan perangkat desa. Maka dari itu semakin profesional kepala desa dan aparaturnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan dan semakin meningkat kan kesejahteraan desa. Hal ini dipengaruhi pula oleh sistem akuntansi yang diolah dengan baik dan teratur. Apabila tingkat pengetahuan kepala desa dan aparaturnya serta sistem akuntansi sudah memadai maka kualitas dari desa itu sendiri akan meningkat dan pendapatan desa yang diberikan pemerintah juga akan meningkat. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima atau terbukti jika tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah serangkaian penelitian yang dilakukan dan berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, tingkat pengetahuan, sistem akuntansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian memperlihatkan jika tingkat pengetahuan memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat melalui hasil uji parsial atau uji t yang menyatakan t hitung $>$ t tabel sebesar $2,159 > 2,042$ dan nilai signifikan $<$ $0,05$ sebesar $0,039 < 0,05$. Adapun nilai pengaruh tingkat pengetahuan sebesar $0,432$ atau $43,2\%$ dapat dilihat pada nilai beta tabel uji t .
2. Hasil penelitian memperlihatkan jika sistem akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat melalui uji parsial atau uji t yang menyatakan t hitung $>$ t tabel sebesar $3,621 > 2,042$ dan nilai signifikan $<$ $0,05$ sebesar $0,001 < 0,05$. Adapun nilai pengaruh sistem akuntansi sebesar $1,037$ atau $103,7\%$ dapat dilihat pada nilai beta tabel uji t .
3. Jika ditarik secara simultan, variabel tingkat pengetahuan ($X1$), sistem akuntansi ($X2$) sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ($X3$). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F hitung $>$ F tabel sebesar $10,565 > 3,32$ dan nilai signifikan $<$ $0,05$ sebesar $0,000 < 0,05$. Adapun hasil uji koefisien determinasi R Square sebesar $0,413$ atau $41,3\%$ yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel tingkat pengetahuan ($X1$), sistem akuntansi ($X2$) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) sebanyak $41,3\%$.

5.2. Saran

Pada penelitan ini peneliti akan memberikan beberapa saran perbaikan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Saran yang diberikan peneliti untuk penelitian ini yaitu:

1. Terkait dengan tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi keuangan desa harus ditingkatkan lagi sesuai dengan apa yang diharapkan. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman akuntansi dapat memberikan kontribusi yang cukup untuk meningkatkan laporan keuangan desa. Ditambah dengan adanya sistem akuntansi yang dapat membantu mempercepat pengelolaan keuangan desa, maka kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Kuta Alam akan lebih baik lagi.
2. Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih belum semua menggunakan website untuk memaparkan hasil kinerja pengelolaan keuangan desa. Alangkah lebih baik bagi setiap desa di Kecamatan Kuta Alam untuk membuat web dan meng-*update* web bagi desa yang sudah memiliki web, untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui kinerja kepala desa dan aparaturnya terutama masyarakat yang menggunakan laporan keuangan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel penelitian yang akan diteliti agar dapat dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian, dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang hanya 33 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya tingkat pengetahuan dan sistem akuntansi. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau untuk mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seperti penyajian laporan keuangan, aksebilitas laporan keuangan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Rusdi. "Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango)." *AkMen JURNAL ILMIAH* 16, no. 4 (2019): 580–593.
- Aceh, Pemerintah Kota Banda. "Kecamatan & Gampong." <https://Bandaacehkota.Go.Id/>. Accessed August 5, 2022. https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan_gampong.html.
- Anaan, Muniifah. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus Covid-19 Di Kompas.Com*. Universitas Pancasakti Tegal, 2020. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>.
- Aribawa, Dwitya. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan UMKM Di Jawa Tengah." *Siasat Bisnis* 20, no. 1 (2016): 1–13. <https://journal.uui.ac.id/JSB/article/view/4424/3907>.
- BPK. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)." (2010). <http://www.dikti.go.id/files/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>.
- Hakim, Abdul, Kirmizi, and Sem Paulus. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dan Sistem Pengendalian Intrn Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 4, no. 1 (2017): 1756–1770.
- Huston, Sandra J. "Measuring Financial Literacy." *Journal of Consumer Affairs* 44, no. 2 (2010): 296–316.
- Kemenkeu, Djpb. "Literasi Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Lentera Pembangunan Desa." Accessed October 28, 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3871-literasi->

- pengelolaan-keuangan-desa-sebagai-lentera-pembangunan-desa.html.
- Marlesta, Alfian, Linda Marlinda, and Sigit Herprabowo. "Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri." *Sniptek 2016* (2016): 324–332.
- Melisa. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang." *Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2019.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Edited by Ema Sri Suharsi. Edisi 4. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016.
- Mustofa, Anies Iqbal. "Pengaruh Penyajian Dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang." *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia* 1, no. 2 (2012): 2. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- OJK. "Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /Seojk.07/2017." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–1699.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah." *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM*, no. September (2009): 1–2.
- Penyusun, T. "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam." *Buku Pedoman* (2018).
- Prastyo, Muhammad Yoga. "KPK RI Berikan Nilai MCP Banda Aceh 87,14%, Tertinggi Di Aceh." *News.Detik.Com*. Last modified 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5908034/kpk-ri-berikan-nilai-mcp-banda-aceh-8714-tertinggi-di-aceh>.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. Cv. Wade Group, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Edited by Maman Abd. Djaliel. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Santoso, Budi. *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar Teori, Dan Problematika Hukum Keagenan*. Edited by Risman Sikumbang. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

- Sanur, Debora. “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh].” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 65–83.
- Saragih, Novia Syahputri, and Denny Kurnia. “Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desakabupaten.” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA* (2019): 1–9.
- Setiana, D. N., & Yuliani, L. N. “Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *University Reseach Colloquim* 5 (2017): 205–210.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni, V.Wiratna. *Sistem Akuntansi*. Edited by Mona. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2020.
- Triani, Atikah, and Rahma Wahdiniwaty. “Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Universitas Komputer Indonesia).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–1699.
- Wibowo, Yoga Angger. “Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” *Uniska Law Review* 1, no. 1 (2020): 38.
- Zeyn, Elvira. “Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan.” *Trikonomika* 10 No. 1 (2011): 52–62.
- Zulganef. *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu
Responden

Penelitian

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan proposal skripsi tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka saya:

Nama : Rizka Azkia Asnawi

NIM : 1705046001

Mengajukan permohonan kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Adapun judul penelitian saya adalah “ **Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh**”. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar.

Perlu disampaikan bahwa dalam pengisian kuesioner ini:

1. Tidak ada jawaban yang benar atau salah.
2. Penelitian yang obyektif sangat diharapkan, karena akan menjadi umpan balik bagi pengembangan penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan Desa.
3. Setiap jawaban sangat bermakna bagi peneliti, sehingga peneliti mengharapkan tidak ada jawaban yang dikosongkan.
4. Jawaban akan diperlakukan dengan standar profesional dan etika penelitian. Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya. Atas waktu dan kerja sama Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Rizka Azkia Asnawi

(1705046001)

KUESIONER PENELITIAN

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk mengisi identitas secara lengkap. Setiap pertanyaan diharapkan hanya ada satu jawaban untuk menjamin validitas data.

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Tingkat Pendidikan : SD
 SMP
 SMA/SMK
 D3
 S1
Lainnya
5. Jabatan :
6. Masa Kerja : < 1 Tahun
 1-5 Tahun
 5-10 Tahun
 > 10 Tahun
7. Nama Desa :

Petunjuk Pengisian

1. Cara pengisian kuesioner adalah:
 - a. Semua pernyataan dijawab dengan memberikan tanda (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu/Sdr(i).
 - b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena peneliti hanya memperhatikan pada suatu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu/Sdr(i).
2. Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu:
STS : Sangat Tidak Setuju (1)
TS : Tidak Setuju (2)
N : Netral (3)
S : Setuju (4)
SS : Sangat Setuju (5)

Responden

TINGKAT PENGETAHUAN

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Pengetahuan						
1.	Memahami akuntansi keuangan desa dan pedoman prosedur akuntansi keuangan desa secara teori.					
2.	Memahami bagaimana penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku.					
Aplikasi						
3.	Memahami akuntansi keuangan desa dan pedoman prosedur akuntansi keuangan desa secara praktek.					
4.	Dapat menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.					
5.	Memahami dan dapat menyusun laporan keuangan dengan melakukan sistem komputerisasi/secara online melalui web resmi yang disediakan oleh pemerintah.					

SISTEM AKUNTANSI

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Formulir/pengidentifikasian						
1.	Pemberian dokumen transaksi seperti surat perintah bayar atau surat tanda setoran kepada bagian keuangan pemerintah desa.					
Penjurnalan, buku besar, dan buku pembantu						
2.	Pada pembukuan dan perhitungan dilakukan perekapan dengan menggunakan computer akuntansi (<i>software</i> akuntansi atau situs web yang telah disediakan untuk keperluan akuntansi pemerintah daerah).					
Laporan Keuangan						
3.	Proses akuntansi secara komputerisasi akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan.					
4.	Laporan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan akan diberikan kepada kepala daerah agar dapat diketahui keseluruhan realisasi APBD dalam satu periode.					

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Perumusan rencana (proses penganggaran)						
1.	Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan yang berlaku.					
Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan						
2.	Pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan belanja didasarkan pada prinsip efektif dan efisien.					
Evaluasi atas kinerja keuangan						
3.	Evaluasi pencapaian kinerja yang dilakukan menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan.					
Pelaksanaan pelaporan keuangan						
4.	Laporan keuangan disampaikan kepada daerah melalui PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.					
5.	Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.					

_ Terima Kasih _

Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden

a. Berdasarkan Variabel Tingkat Pengetahuan (X1)

Tingkat Pengetahuan (X1)						
No Resp.	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1.	4	5	5	5	5	24
2.	5	5	5	5	5	25
3.	5	4	4	4	5	22
4.	5	5	4	4	5	23
5.	4	5	5	5	5	24
6.	4	4	5	5	5	23
7.	4	4	4	4	4	20
8.	5	5	5	5	5	25
9.	5	5	5	5	5	25
10.	4	4	4	4	4	20
11.	4	5	4	4	5	22
12.	4	5	5	5	4	23
13.	4	4	5	5	5	23
14.	5	5	5	5	5	25
15.	4	4	4	4	4	20
16.	5	5	4	4	4	22
17.	4	4	5	5	5	23
18.	5	4	4	5	5	23
19.	5	5	4	4	5	23
20.	5	4	5	5	4	23
21.	4	4	4	4	4	20
22.	4	4	4	4	3	19
23.	5	4	4	5	4	22
24.	4	4	4	5	5	22
25.	5	5	5	5	5	25
26.	4	4	4	4	4	20
27.	4	5	4	4	4	21
28.	4	4	4	4	4	20
29.	4	4	4	4	5	21
30.	4	5	4	5	5	23
31.	5	5	5	5	5	25
32.	5	5	5	5	5	25
33.	4	5	4	5	5	23

b. Berdasarkan Variabel Sistem Akuntansi (X2)

Sistem Akuntansi (X2)				
No Resp.	SA1	SA2	SA3	Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	
1.	5	5	5	15
2.	5	4	5	14
3.	4	4	5	13
4.	5	5	5	15
5.	5	5	5	15
6.	4	4	4	12
7.	4	5	5	14
8.	5	5	5	15
9.	4	5	4	13
10.	5	4	4	13
11.	4	4	3	11
12.	5	4	4	13
13.	5	5	5	15
14.	5	5	5	15
15.	4	4	5	13
16.	4	4	4	12
17.	4	4	4	12
18.	4	4	4	12
19.	5	5	4	14
20.	4	4	4	12
21.	4	4	4	12
22.	5	4	4	13
23.	4	4	4	12
24.	4	4	4	12
25.	5	5	4	14
26.	5	5	5	15
27.	4	4	4	12
28.	5	5	5	15
29.	5	5	5	15
30.	5	5	5	15
31.	4	4	5	13
32.	4	4	5	13
33.	4	5	4	13

c. Berdasarkan Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)								
No Resp.	APKD 1	APKD 2	APKD 3	APKD 4	APKD 5	APKD 6	APKD 7	Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
1.	5	5	5	5	5	5	5	35
2.	5	5	5	5	5	5	5	35
3.	5	5	4	4	4	5	4	31
4.	5	5	5	5	4	4	4	32
5.	5	5	4	5	4	4	3	30
6.	4	4	4	4	4	4	4	28
7.	4	4	5	4	4	4	4	29
8.	4	5	4	5	4	5	5	32
9.	4	4	4	4	4	4	4	28
10.	4	4	5	5	5	5	4	32
11.	4	5	4	4	4	4	4	29
12.	5	5	5	5	4	5	5	34
13.	5	5	5	5	5	5	5	35
14.	5	5	5	5	5	5	5	35
15.	5	5	5	5	5	5	4	34
16.	4	4	4	4	4	4	4	28
17.	4	4	4	4	5	5	4	30
18.	5	4	4	4	4	5	4	30
19.	5	5	4	4	4	4	4	30
20.	4	4	4	4	4	4	4	28
21.	4	4	4	4	4	4	4	28
22.	3	4	4	4	4	4	4	27
23.	4	4	4	4	4	4	4	28
24.	4	4	4	4	4	4	4	28
25.	5	5	5	4	5	5	5	34
26.	4	5	5	4	4	5	3	30
27.	4	4	4	4	4	4	4	28
28.	5	5	5	4	5	5	4	33
29.	4	5	4	5	4	5	4	31
30.	5	4	4	4	4	5	4	30
31.	5	5	5	5	5	3	5	33
32.	5	5	5	5	5	3	5	33
33.	4	5	4	4	5	4	3	29

Lampiran 3 Deskripsi Responden

a. Berdasarkan Jenis kelamin

L/P

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	20	60.6	60.6	60.6
	Perempuan	13	39.4	39.4	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

b. Berdasarkan Usia

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-30 Tahun	2	6.1	6.1	6.1
	31-40 Tahun	15	45.5	45.5	51.5
	41-50 Tahun	8	24.2	24.2	75.8
	51-60 Tahun	5	15.2	15.2	90.9
	61-70 Tahun	3	9.1	9.1	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/SMK	8	24.2	24.2	24.2
	D3	5	15.2	15.2	39.4
	S1	20	60.6	60.6	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

d. Berdasarkan Jabatan

Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kepala Desa	11	33.3	33.3	33.3
	Sekretaris	11	33.3	33.3	66.7
	Keuangan	11	33.3	33.3	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

e. Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<1 Thn	3	9.1	9.1	9.1
	1-5 Thn	14	42.4	42.4	51.5
	6-10 Thn	8	24.2	24.2	75.8
	>10 Thn	8	24.2	24.2	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

Lampiran 4 Deskripsi Variabel

a. Berdasarkan Variabel Tingkat Pengetahuan (X1)

TP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	19	57.6	57.6	57.6
SS	14	42.4	42.4	100.0
Total	33	100.0	100.0	

TP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	16	48.5	48.5	48.5
SS	17	51.5	51.5	100.0
Total	33	100.0	100.0	

TP3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	19	57.6	57.6	57.6
SS	14	42.4	42.4	100.0
Total	33	100.0	100.0	

TP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	14	42.4	42.4	42.4
SS	19	57.6	57.6	100.0
Total	33	100.0	100.0	

TP5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	1	3.0	3.0	3.0
S	11	33.3	33.3	36.4
SS	21	63.6	63.6	100.0
Total	33	100.0	100.0	

b. Berdasarkan Variabel Sistem Akuntansi (X2)

SA1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	17	51.5	51.5	51.5
SS	16	48.5	48.5	100.0
Total	33	100.0	100.0	

SA2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	18	54.5	54.5	54.5
SS	15	45.5	45.5	100.0
Total	33	100.0	100.0	

SA3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	3.0	3.0	3.0
	S	16	48.5	48.5	51.5
	SS	16	48.5	48.5	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

c. Berdasarkan Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

APKD1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	3.0	3.0	3.0
	S	16	48.5	48.5	51.5
	SS	16	48.5	48.5	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

APKD2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	14	42.4	42.4	42.4
	SS	19	57.6	57.6	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

APKD3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	19	57.6	57.6	57.6
	SS	14	42.4	42.4	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

APKD4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	20	60.6	60.6	60.6
	SS	13	39.4	39.4	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

APKD5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	21	63.6	63.6	63.6
	SS	12	36.4	36.4	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

APKD6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	6.1	6.1	6.1
	S	15	45.5	45.5	51.5
	SS	16	48.5	48.5	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

APKD7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	9.1	9.1	9.1
	S	21	63.6	63.6	72.7
	SS	9	27.3	27.3	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

Lampiran 5 Uji Validitas

a. Tingkat Pengetahuan (X1)

Correlations

		TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	Tingkat Pengetahuan
TP1	Pearson Correlation	1	.342	.256	.241	.282	.594**
	Sig. (2-tailed)		.051	.151	.177	.112	.000
	N	33	33	33	33	33	33
TP2	Pearson Correlation	.342	1	.342	.271	.410*	.667**
	Sig. (2-tailed)	.051		.051	.127	.018	.000
	N	33	33	33	33	33	33
TP3	Pearson Correlation	.256	.342	1	.737**	.394*	.764**
	Sig. (2-tailed)	.151	.051		.000	.023	.000
	N	33	33	33	33	33	33
TP4	Pearson Correlation	.241	.271	.737**	1	.503**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.177	.127	.000		.003	.000
	N	33	33	33	33	33	33
TP5	Pearson Correlation	.282	.410*	.394*	.503**	1	.744**
	Sig. (2-tailed)	.112	.018	.023	.003		.000
	N	33	33	33	33	33	33
Tingkat Pengetahuan	Pearson Correlation	.594**	.667**	.764**	.774**	.744**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Sistem Akuntansi (X2)

Correlations

		SA1	SA2	SA3	Sistem Akuntansi
SA1	Pearson Correlation	1	.576**	.407*	.807**
	Sig. (2-tailed)		.000	.019	.000
	N	33	33	33	33
SA2	Pearson Correlation	.576**	1	.458**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000		.007	.000
	N	33	33	33	33
SA3	Pearson Correlation	.407*	.458**	1	.787**
	Sig. (2-tailed)	.019	.007		.000
	N	33	33	33	33
Sistem Akuntansi	Pearson Correlation	.807**	.830**	.787**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Correlations

		APKD1	APKD 2	APKD 3	APKD 4	APKD 5	APKD 6	APKD 7	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
APKD1	Pearson Correlation	1	.592**	.512**	.457**	.402*	.238	.405*	.749**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.008	.020	.182	.019	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
APKD2	Pearson Correlation	.592**	1	.489**	.567**	.394*	.197	.271	.714**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.001	.023	.273	.126	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
APKD3	Pearson Correlation	.512**	.489**	1	.563**	.626**	.209	.475**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.002	.004		.001	.000	.243	.005	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
APKD4	Pearson Correlation	.457**	.567**	.563**	1	.422*	.152	.500**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.008	.001	.001		.014	.397	.003	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
APKD5	Pearson Correlation	.402*	.394*	.626**	.422*	1	.199	.418*	.702**
	Sig. (2-tailed)	.020	.023	.000	.014		.267	.015	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
APKD6	Pearson Correlation	.238	.197	.209	.152	.199	1	.127	.467**
	Sig. (2-tailed)	.182	.273	.243	.397	.267		.482	.006
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
APKD7	Pearson Correlation	.405*	.271	.475**	.500**	.418*	.127	1	.669**
	Sig. (2-tailed)	.019	.126	.005	.003	.015	.482		.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
Akuntabilita s Pengelolaa n Keuangan Desa	Pearson Correlation	.749**	.714**	.789**	.745**	.702**	.467**	.669**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.006	.000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6 Uji Reliabilitas

a. Tingkat Pengetahuan (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.752	5

b. Sistem Akuntansi (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.731	3

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	7

Lampiran 7 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pengetahuan	33	19	25	22.55	1.822
Sistem Akuntansi	33	11	15	13.39	1.273
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	33	27	35	30.82	2.567
Valid N (listwise)	33				

Lampiran 8 Uji Normalitas

a. Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

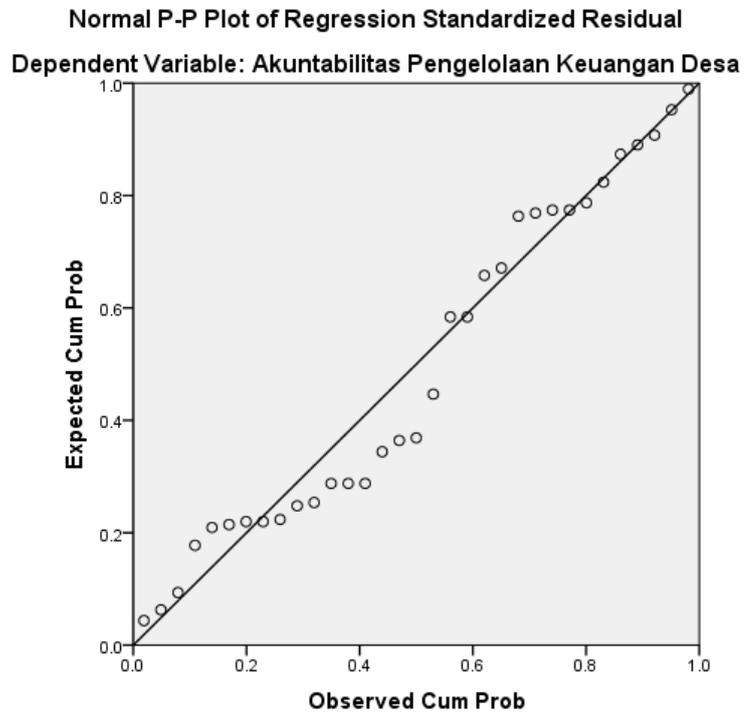
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.96650320
Most Extreme Differences	Absolute	.150
	Positive	.150
	Negative	-.104
Test Statistic		.150
Asymp. Sig. (2-tailed)		.056 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

b. Metode Grafik P-P Plot



Lampiran 9 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.189	5.401		1.331	.193		
Tingkat Pengetahuan	.432	.200	.307	2.159	.039	.970	1.031
Sistem Akuntansi	1.037	.286	.514	3.621	.001	.970	1.031

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 10 Uji Heterokedastisitas

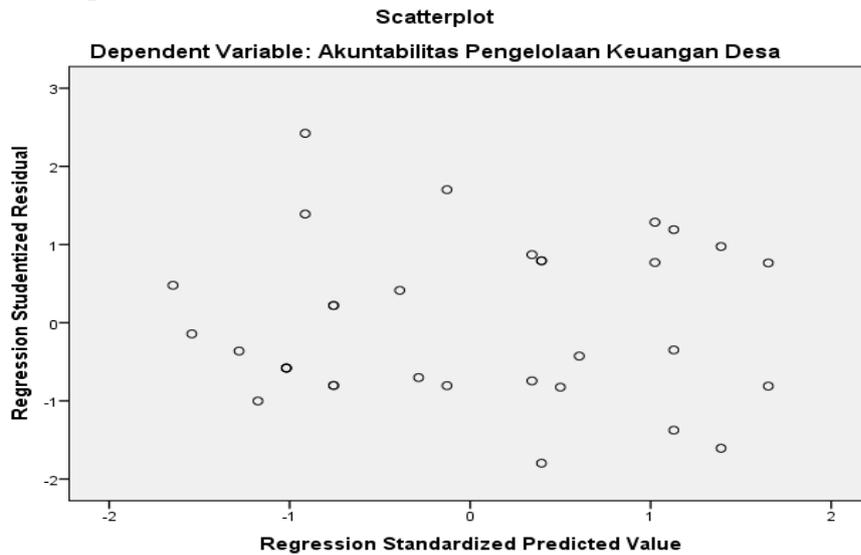
a. Metode Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.460	2.607		-.560	.580
Tingkat Pengetahuan	.029	.097	.055	.305	.763
Sistem Akuntansi	.185	.138	.240	1.336	.191

a. Dependent Variable: RES2

b. Scatterplot



Lampiran 11 Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.189	5.401		1.331	.193
	Tingkat Pengetahuan	.432	.200	.307	2.159	.039
	Sistem Akuntansi	1.037	.286	.514	3.621	.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 12 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	87.161	2	43.580	10.565	.000 ^b
	Residual	123.748	30	4.125		
	Total	210.909	32			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi, Tingkat Pengetahuan

**Lampiran 13 Uji Koefisien Determinan (R^2)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.189	5.401		1.331	.193
Tingkat Pengetahuan Sistem Akuntansi	.432	.200	.307	2.159	.039
	1.037	.286	.514	3.621	.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 14 Surat Penelitian Kecamatan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 1467/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

26 April 2022

Yth :
Kecamatan Kuta Alam
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : RIZKA AZKIA ASNAWI
Nim : 1705046001
Semester : X
Jurusan / Prodi : S1 Akuntansi Syariah
Alamat : Komplek KUD Rahmad No 3 kelurahan Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN SISTEM
AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA KECAMATAN KUTA ALAM BANDA
ACEH
Waktu Penelitian : 25 April 2021 sampai selesai
Lokasi Penelitian : Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
lembagaan,

R. FATONI

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Adapun lokasi penelitian yang termasuk dalam Kecamatan Kuta alam diantaranya sebagai berikut:

1. Gampong Peunayong
2. Gampong Mulia
3. Gampong Laksana
4. Gampong Keuramat
5. Gampong Kuta Alam
6. Gampong Beurawe
7. Gampong Kota Baru
8. Gampong Bandar Baru
9. Gampong Lampulo
10. Gampong Lamdingin
11. Gampong Lambaro Skep

Lampiran 15 Surat Penelitian Desa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 1467/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2022

26 April 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Yth :

Kepala Desa dan Aparat Gampong Kecamatan Kuta Alam

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : RIZKA AZKIA ASNAWI
Nim : 1705046001
Semester : X
Jurusan / Prodi : S1 Akuntansi Syariah
Alamat : Komplek KUD Rahmad No 3 kelurahan Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN SISTEM
AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA KECAMATAN KUTA ALAM BANDA
ACEH
Waktu Penelitian : 25 April 2021 sampai selesai
Lokasi Penelitian : Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

lembagaan,



Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Adapun lokasi penelitian yang termasuk dalam Kecamatan Kuta alam diantaranya sebagai berikut:

1. Gampong Peunayong
2. Gampong Mulia
3. Gampong Laksana
4. Gampong Keuramat
5. Gampong Kuta Alam
6. Gampong Beurawe
7. Gampong Kota Baru
8. Gampong Bandar Baru
9. Gampong Lampulo
10. Gampong Lamdingin
11. Gampong Lambaro Skep

Lampiran 16 Surat Persetujuan Penelitian Kecamatan



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 285

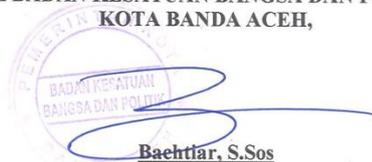
- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 39242/Un.10.5/D1/PG.00/11/2021 Tanggal 19 November 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Rizka Azkia Asnawi
- Alamat : Jl. Komp. KUD Rahmad No.3 Gampong Cot Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Nur Fatoni (Wakil Bid. Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 April 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**



Bahtiar, S.Sos

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

Lampiran 17 Surat Persetujuan Penelitian Desa



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KANTOR CAMAT KUTA ALAM

Jl. Syiah Kuala No.4 Telp. (0651) 32407. Kode Pos-23126 BANDA ACEH

Banda Aceh, 27 April 2022

Nomor : 070/08
Kepada
Lampiran : -
Yth. Para Keuchik Gampong Dalam Wilayah
Hal : Izin Penelitian
Kecamatan Kuta Alam
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/285 tanggal 25 April 2022, Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberi izin serta memohon bantuan Saudara kepada :

Nama : Rizka Azkia Asnawi
NIM : 1705046001
Jurusan : S1 Akutansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Untuk melakukan penelitian dengan judul : "Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh".

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih



RIWAYAT HIDUP



Rizka Azkia Asnawi lahir di Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Mei 1999, penulis merupakan anak pertama dari Bapak Asnawi M. Amin dan Ibu Muthmainnah. Kedua adik penulis yaitu Muhammad Syafiq Asnawi yang merupakan mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Suhaila Asnawi yang juga mahasiswi di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Saat ini penulis tinggal di Komplek KUD Rahmad No. 3 Kelurahan Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Pada tahun 2004 penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di TK Arifa Kota Banda Aceh, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Kartika XIV-1 Kota Banda Aceh dan tamat pada tahun 2011. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs. Pp. Ar-Raudhatul Hasanah Medan Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2014 kemudian melanjutkan ke MAs. PP. Ar-Raudhatul Hasanah Medan Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus sekolah pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan dan menjadi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah, dan berhasil menyelesaikan studi serta mendapat gelar di tahun 2022. Adapun kegiatan yang pernah diikuti oleh penulis selama menjadi Mahasiswi diantaranya adalah pengurus Tax Center sebagai anggota Riset dan Publikasi pada tahun 2020, anggota relawan pajak KPP Pratama Kudus pada tahun 2020, anggota relawan pajak UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021, fasilitator program Lingkar Remaja Aceh pada tahun 2021, dan anggota organisasi daerah KMA (Keluarga Mahasiswa Aceh) dari tahun 2017 hingga saat ini, anggota anggota IKRH (Ikatan Keluarga Raudhatul Hasanah) cabang Semarang dan Banda Aceh dari tahun 2017 hingga saat ini.